

UPAYA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG DALAM PENGELOLAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH DAN PERTANIAN TERPADU

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RIZKI NURIN NAZILAH

NIM.145030101111133



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

“Bertaqwalah kamu kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu.

Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”

(QS. Al-Baqarah:282)

“Berangkat dengan penuh keyakinan,berjalan dengan penuh keikhlasan.

Yakinlah pasti ada kemudahan”

(Nina)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam
Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Program
Pertanian Terpadu

Disusun oleh : Rizki Nurin Nazilah

NIM : 145030101111133

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 16 Maret 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Mochamad Makmur, MS.
NIP. 19511028 198003 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 16 Maret 2018

Mahasiswa



Nama : Rizki Nurin Nazilah

NIM : 145030101111133

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 April 2018

Waktu : Pukul 10.00 WIB

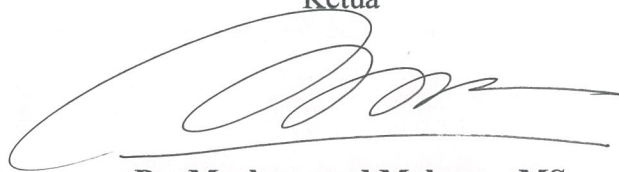
Skripsi Atas Nama : Rizki Nurin Nazilah

Judul : Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

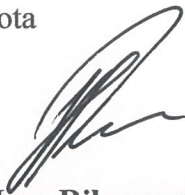
Ketua



Dr. Mochammad Makmur, MS

NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS

NIP.19520911 197903 1 002

Anggota



Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP

NIP. 851214 03 11 0130

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Subeki. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Charis Sunisak. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya, Nadiya Rizki Fitriana dan Muhammad Pelyan Afi Akbar, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.

Rizki Nurin Nazilah, 2018. **Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu.** Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Mochamad Makmur, MS. 138 halaman + xv

RINGKASAN

Pertanian terpadu merupakan gabungan dari program yang saling berkaitan satu sama lain yang diwujudkan dalam alur pembangunan strategis dan implementatif. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu diimplementasikan menjadi tiga program unggulan yaitu program peningkatan kesuburan tanah, program peningkatan produktivitas tanaman, dan program peningkatan dinamika penyuluhan dan dinamika kelompok tani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. sumber datanya primer diperoleh dari wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topic yang ada. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, alat perekam dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan dan pertanian terpadu dilihat dari strategi fungsional manajemen, yang mencakup fungsi-fungsi manajemen antara lain: (1) *Planning*, dilaksanakan dengan melibatkan semua bidang Dinas Pertanian terkait dalam rangka menyupport keberhasilan program, (2) *Organizing*, dilaksanakan Dinas Pertanian dengan melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait seperti Seperti Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertanian sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing. (3) *Staffing*, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 114 personil PNS yang terdiri dari 33 orang anggota fungsional umum dan 81 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). (4) *Actuating* di implemntasikan dengan tiga program unggulan antara yaitu (a) peningkatan kesuburan tanah, (b) peningkatan produksi dan hasil pertanian melalui optimalisasi lahan yaitu intensifikasi lahan dan ekstensifikasi lahan, (c) peningkatan dinamika penyuluhan dan kelompok tani. (5) *Controlling* dilaksanakan oleh kepala bidang, kepala dinas dan inpektorat untuk meningkatkan kinerja pegawai. (6) *Budgeting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2 (APBD Kabupaten).

Rizki Nurin Nazilah ,2018. **The Effort of Jombang Agriculture Department in Management of Food Security and Integrated Agriculture.** Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Dr. Mochamad Makmur MS. 138 pages + xv

SUMMARY

Integrated agriculture is a composite of a related program which is created in materialized form of strategic and implementative development. The effort of Jombang Agriculture Department in management of local food security and integrated agriculture program is implemented into three excellent programs namely the program of soil fertility improvement, plant productivity improvement program, and improvement program of dynamics of counseling and group dynamics of farmers.

This research uses descriptive qualitative located in Jombang Agriculture Department. The primary data source is obtained from interviews from related informants, while secondary data is obtained from documents related to existing topics. The researcher uses technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the instrument of the research is the researcher itself, and some supporting tools such as interview guides, recording devices and other aids.

The result of the research shows that the effort of Jombang Agriculture Department in management of food security and integrated agriculture is seen from the functional strategy of management, which covers the management functions such as: (1) Planning, implemented by involving all relevant Agriculture Department in order to support the success of the program. (2) Organizing, implemented by the Agriculture Office by coordinating with related agencies such as Fisheries and Marine Service and Agriculture Agency in accordance with the respective SKPD authority. (3) Staffing, Jombang Agriculture Department supported by 114 civil servants consisting of 33 general functional members and 81 Filed Agricultural Extension. (4) Actuating is implemented with three superior programs between (a) increasing soil fertility, (b) increasing production and agricultural output through land optimization is a land intensification and land extensification , (c) increasing the extension dynamic and farmer groups. (5) Controlling is carried out by the head of the field, head of the department and in pektorat to improve employee performance. (6) Budgeting is derived from Regional Budget (ABPD) 2.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Subeki dan Ibu Charis Sunisak yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

5. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Keluarga Besar Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
8. Saudari-saudariku tercinta yaitu Nadiya Rizki Fitriana dan Muhammad Pelyan Afi Akbar serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
9. Sahabatku yaitu Sayangku (Shofilatul Miladiah, Ismiatul Azizah, Muhamad Hilmi Himawan) yang telah memberi semangat, dukungan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Keluarga Besar Kontrakan Beriman (Fitriyatunnisa Zulisa, Khoirin Nisa Irdiani, dan Ratih Wahyu), yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabatku Magang Gengs (Cicik Mamlu'ul Hikmah, Angraini Ayu Wulandari, Udhin Pamungkas, Freddy Limantara), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis

12. Keluarga Besar Regarda Avenir 46 Darul Ulum Peterongan Jombang yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis

13. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Administrasi Publik.....	12
1. Pengertian Administrasi Publik	12
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	13
B. Manajemen Pelayanan publik	16
1. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik	16
2. Klasifikasi Pelayanan Publik	16
3. Azas-Azas Pelayanan Publik	19
C. Pelayanan Prima	21
1. Pengertian Pelayanan Prima	21
2. Tujuan Pelayanan Prima	22
D. Strategi	23
1. Pengertian Strategi	23
2. Tingkat-Tingkat Strategi	24
F. Otonomi Daerah	31
1. Pengertian Otonomi Daerah	29
2. Tujuan Otonomi Daerah	33
G. Ketahanan Pangan	34
1. Pengertian Ketahanan Pangan	34
2. Indikator Ketahanan Pangan	35
E. Program Pertanian Terpadu	35

BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis Penelitian.....	37
	B. Fokus Penelitian	38
	C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
	D. Jenis dan Sumber Data	41
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	F. Instrumen Penelitian	44
	G. Analisis Data	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
	A. Gambaran umum lokasi penelitian	48
	1. Gambaran umum Kabupaten Jombang.....	48
	a. Sejarah Kabupaten Jombang.....	48
	b. Letak geografis dan luas wilayah Kabupaten Jombang.....	50
	c. Visi dan Misi Kabupaten Jombang.....	53
	d. Demografi Kabupaten Jombang	55
	2. Gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	56
	a. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	56
	b. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.....	57
	c. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang .	60
	3. Gambaran umum program pertanian terpadu	77
	B. Penyajian Data	80
	1. Upaya Dinas Pertanian Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian	80
	2. Faktor pendukung dan Penghambat Upaya Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu.....	102
	C. Analisis data.....	106
	1. Upaya Dinas Pertanian Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu	106
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu.....	129
BAB V	PENUTUP	132
	A. Kesimpulan	132
	B. Saran	132
	DAFTAR PUSTAKA	137
	LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan di Kabupaten Jombang	5
Tabel 2. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang	6
Tabel 3. Realisasi Situasi Pangan di Kabupaten Jombang	8
Tabel 4. Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan Tahun 2016.....	52
Tabel 5. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Jombang	55
Tabel 6. Komposisi pegawai menurut golongan/kepangkatan.....	76
Tabel 7. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan.....	76
Tabel 8. Komposisi pegawai menurut jabatan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	47
Gambar 2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jombang	50
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang	60
Gambar 4. Pola Pelaksanaan Program Pertanian Terpadu	79
Gambar 5 dan 6. Dokumentasi.....	83
Gambar 7. Dokumentasi.....	87
Gambar 8. Outbond Peningkatan Kualitas dan Perkokok Penyuluh	90
Gambar 9. Penyerahan Bantuan Alat Pertanian	94
Gambar 10. Intensifikasi Lahan	95
Gambar 11. Ekstensifikasi Lahan	95
Gambar 12. Apel Pagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.....	97
Gambar 13. Dokumentasi	101
Gambar 14. Contoh Berita	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk kelangsungan hidup yang sehat dan aman. Pangan sebagai kebutuhan yang mendasar, ketersediaan dan pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 12 (dua belas) ayat 4 (empat) bahwa penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan tersebut masalah ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah di suatu negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan dan Gizi pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Beragam bahan pangan yang tersedia cukup banyak di berbagai daerah di Indonesia, hanya ada beberapa yang masih dikonsumsi sebagai bahan pangan pokok. Beras merupakan salah sumber bahan pangan pokok yang dikonsumsi sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional maka perlu mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Kebutuhan akan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara nasional maupun regional oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana pengawasan, sedangkan masyarakat sebagai produksi dan pengelolaan. Pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam memenuhi ketersediaan dan kecukupan kebutuhan akan pangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Bab VI pasal 72 pengawasan dalam pemenuhan ketersediaan pangan yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat melalui:

1. Perhitungan neraca pangan secara berkala.
2. Pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan dalam negeri.
3. Pengelolaan cadangan pangan nasional.
4. Pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor.
5. Pengaturan distribusi dan pemasaran pangan.

Masyarakat sebagai produksi dan pengelolaan pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Bab VIII pasal 86 mengenai peran serta masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan pangan.
2. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan.
3. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
4. Pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan dan gizi.
5. Pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi.

FAO dalam Hanafie (2010:272) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua masyarakat mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan bagi seluruh rumah tangga dan anggota keluarga agar tidak beresiko untuk kehilangan kedua akses tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) mendefinisikan:

Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sejalan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, maka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di pusat dan di daerah diatur sesuai dengan peta kewenangan pemerintah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengelola pembangunan daerah termasuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan isu yang sangat kompleks dalam suatu negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut Ilham (2006:155) permasalahan ketahanan pangan nasional muncul baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran. Permintaan (*demand*) ditandai dengan permintaan pangan semakin meningkat yang di iringi dengan pertumbuhan populasi penduduk, sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) terjadi penurunan tersedianya pangan yang disebabkan karena berkurangnya jumlah produksi pangan akibat dari faktor alam seperti perubahan iklim dan pemanfaatan fungsi lahan. Dampak dari perubahan iklim dan alih fungsi lahan mengakibatkan ketidakpastian hasil produksi. Ketidakseimbangan permintaan dan kapasitas hasil produksi akan mengakibatkan meningkatnya penyediaan pangan nasional yang berasal dari impor.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2015:2) upaya pemantapan ketahanan pangan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan seperti, konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman, agribisnis yang belum optimal, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi hasil produksi pertanian pangan. Konversi lahan pertanian yang tidak terbandung akan berdampak pada kurang atau hilangnya hasil pertanian terutama masyarakat yang mata pencahariannya hanya sebagai petani. Agribisnis yang belum optimal mengakibatkan para petani kehilangan sebagian bahan pangan, karena lebih memilih untuk menjual ke tengkulak. Perubahan iklim berakibat pada hasil produktivitas dan produksi. Permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten yang terletak dibagian tengah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km² dari tahun ke tahun di dominasi di peruntukan lahan pertanian sebesar 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang Keseluruhan. Kabupaten Jombang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian sehingga perekonomiannya masih di titik beratkan pada kegiatan sektor pertanian, akan tetapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan analisis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang ada permasalahan paling utama yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Jombang diantaranya adalah menurunnya tingkat kesuburan tanah karena penggunaan pupuk kimia dan tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian. Berikut merupakan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang yang

menunjukkan perkembangan luas tanah di Kabupaten Jombang menurut penggunaannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Perkembangan Luas Lahan di Kabupaten Jombang Dari Tahun 2013-2016

No.	Tanah	Bahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Sawah	50.097.86	48.635	48.707	48.707
2.	Non sawah	51.689	51.679	51.659	51.637
3.	Bukan pertanian	15.510	15.534	15.584	15.606
4.	Perkebunan	675,98	220	251	251
5.	Tegalan	13.617.36	10.492	10.487	10.465
6.	Hutan rakyat	6.221	6.221	6.221	6.221
7.	Pengairan	48.696	48.637	48.707	48.701
8.	Lainnya	1.012.61	16.933	13.111	11.558
	Jumlah	6.662.497	191.351	194.727	193.146

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel 1 diatas perkembangan luas lahan di Kabupaten Jombang dalam empat tahun terakhir ini mengalami angka naik turun. Terutama di tanah tegalan yang terus mengalami penyusutan dari luas lahan 13.617,36 hektar pada tahun 2013 menjadi 10.465 hektar pada tahun 2016. Sedangkan tanah yang digunakan untuk lahan bukan pertanian terus melebar dari 15.510 hektar pada tahun 2013 hingga 15.606 hektar pada tahun 2016. Meningkatnya pemanfaatan lahan produktif di Kabupaten Jombang saat ini di prediksi akan mengancam hasil pertanian Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun. Karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Permasalahan tersebut mengakibatkan perkembangan hasil produksi pertanian terutama untuk produksi tanaman pangan di Kabupaten Jombang mengalami angka naik turun sesuai dengan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2013-2016, sebagai berikut:

Tabel 2: Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2013-2016 (ton)

No.	Tahun Tanaman pangan	2013	2014	2015	2016
1.	Padi	432.173	431.175	450.810	475.079
2.	jagung	197.353	233.448	71.95	241.325
3.	kedelai	8.248	10.822	9.747	6.429
4.	Kacang tanah	1.120	599	1.059	1.059
5.	Kacang hijau	99	78	231	250
6.	Ubi kayu	13.897	12.261	10.148	24.587
7.	Ubi jalar	2.736	3.215	5.412	1.965
	Jumlah	754.527	1.367.921	780.126	1.000.444

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Dari tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil produksi tanaman pangan secara keseluruhan di Kabupaten Jombang mengalami angka naik turun yaitu 754.527 ton pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 1.367.921 ton pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 produksi tanaman pangan mengalami penurunan menjadi 780.126 ton, kemudian pada tahun 2016 produksi tanaman pangan Kabupaten Jombang mengalami peningkatan menjadi 1.000.444 ton. Peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2016 menunjukkan statistik yang cukup bagus, namun hal itu tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Jombang untuk tahun yang akan datang.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan diatas. Apabila *mindset* masyarakat Kabupaten Jombang terutama para petani tidak bisa dirubah, maka kemungkinan besar masyarakat Kabupaten Jombang lebih banyak kehilangan bahan pangan. Hal ini dikarenakan ketidakpastian hasil produktivitas dan produksi terutama bahan pangan. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan ketahanan pangan atau ketersediaan pangan di Kabupaten Jombang. Sebagai

birokrasi public, upaya inovatif yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam mengatasi permasalahan pertanian yang ada adalah melalui pertanian terpadu. Pertanian terpadu merupakan gabungan dari program-program yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Kholilulloh (2013:142) keterkaitan tersebut diwujudkan dalam tiga program unggulan yaitu: program peningkatan kesuburan tanah, program peningkatan produktivitas tanaman, dan program peningkatan dinamika penyuluhan dan dinamika kelompok tani.

Dilihat dari upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mampu mencapai keberhasilan dalam implementasi pertanian terpadu sesuai dengan visi dan misi. Bukti keberhasilan tersebut dapat diketahui melalui data yang ditunjukkan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, yakni adanya peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 59.93 ton pada tahun 2013 menjadi 61.08 ton pada tahun 2016. Bahkan produksi tanaman padi juga mengalami peningkatan sebesar 432.173 ton menjadi 475.079 ton pada tahun 2016. Disamping itu, data dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa situasi pangan di Kabupaten Jombang menunjukkan tren positif dengan terjadinya surplus beras pada tahun 2013 sampai dengan 2016 berdasarkan penyediaan bahan pangan penduduk perkapita per tahun. Pernyataan tersebut sesuai dengan tabel realisasi situasi pangan di Kabupaten Jombang pada tahun 2013-2016 sebagai berikut:

Tabel 3: Realisasi Situasi Pangan di Kabupaten Jombang Dari Tahun 2013-2016

NO	URAIAN	VOLUME			
		2013	2014	2015	2016
1	Luas Tanaman Padi	73.714 Ha	71.454 Ha	75.927 Ha	81.487 Ha
2	Luas Panen Bersih	72.117 Ha	69.098 Ha	77.408 Ha	77.777 Ha
3	Produksi	59.93 Ton	62.4 Ton	60.6 Ton	61.08 Ton
4	Beras Tersedia untuk Konsumsi	266.605 Ton	265.989 Ton	276.078 Ton	293.073 Ton
5	Jumlah Penduduk	1.290,335 Jiwa	1.419,137 Jiwa	1.419,137 Jiwa	1.419,137 Jiwa
6	Kebutuhan Beras Penduduk	117.756 kg/kpt/thn	132.547 kg/kpt/thn	129.510 kg/kpt/thn	129.510 kg/kpt/thn
7	Kelebihan (Surplus)	148.849 Ton	133.441 Ton	146.567 Ton	163.562 Ton

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa situasi pangan di Kabupaten Jombang dapat dikatakan cukup baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan penduduk. Hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya *surplus* beras pada tahun 2013-2016 berdasarkan pada realisasi luas tanaman, luas panen bersih, produksi, ketersediaan beras untuk konsumsi, jumlah penduduk serta kebutuhan beras penduduk. Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah dipaparkan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu.

D. Kontribusi Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi sebagai berikut:

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk bisa dikembangkan.

2. Manfaat praktis:

- a. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu.
- b. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan ketahanan pangan daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami atas proposal skripsi ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang telah dipaparkan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti membagi ke dalam 5 bab yang masing-masing memiliki keterkaitan satu sama yang lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi 5 sub bab. Pertama, akan mendeskripsikan latar belakang. Kedua, berisi rumusan masalah penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, kontribusi penelitian. Kelima, berisi sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori sebagai landasan dalam melakukan analisis mengenai topik skripsi, yaitu upaya pemerintah Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu. Dalam kajian pustaka penulis

memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian peneliti mencoba menjelaskan dan menggambarkan jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situs, sumber data, teknik yang dipakai pada proses pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang analisis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dicantumkan pada bab I. Bab IV merupakan langkah selanjutnya dalam menganalisis topik yang diteliti berdasarkan teori yang sudah di cantumkan penulis di bab II dan metodologi penelitian dalam bab III. Bab IV menjelaskan tentang analisis mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu dan analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pertanian terpadu.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Indrari (2010:1-2) kata “administrasi” berasal dari kata *administrare* (Latin: ad = pada, ministrare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Kata “administrasi” juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Kata “administrasi” juga dapat berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen.

Pengertian publik dalam kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Saddily, 1997 dalam Indrari Sjamisjar (2010:110) kata “*publik*” berarti (masyarakat) umum, rakyat. Frederickson (1997:46) dalam Pasolong (2008:6-7) menjelaskan konsep publik yaitu: publik sebagai kelompok kepentingan yang dilihat dari manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.

- a. Publik sebagai pemilih yang rasional yaitu masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- b. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara.
- c. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sendiri tidak terdiri dari individu-individu dengan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi, karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.
- d. Publik dianggap sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Menurut Rosenbloom (2005) dalam Pasolong (2008:8) administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan menurut Henry (1988) dalam pasolong (2008:8) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya administrasi publik berusaha untuk mengkombinasi teori-teori manajemen dalam administrasi agar terciptanya nilai efektivitas dan efisiensi untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu administrasi publik diharapkan tidak hanya gambaran-gambaran pemikiran para ahli akan tetapi juga harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang nyata dari hasil pemikiran tersebut.

2. Ruang Lingkup Administrasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) dalam Syafri (2012:115-116) sebagai suatu disiplin dan sistem, ruang lingkup administrasi publik meliputi hal-hal berikut:

a) Tata nilai

Tata nilai adalah sesuatu yang berhubungan dengan nilai kultural, spiritual, etika, falsafah hidup yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi publik.

b) Organisasi pemerintahan Negara

Organisasi pemerintahan Negara terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan), dan lembaga-lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.

c) Manajemen pemerintahan Negara

Manajemen pemerintahan negara meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil-hasil dari setiap atau keseluruhan organisasi pemerintah negara.

d) Sumber daya aparatur

Sumber daya manusia sebagai unsur yang dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pengelolaan dan pembinaannya dari proses *recruitmen*, pengembangan kompetensi, pengembangan karier dan kesejahteraan serta pemensiunannya.

e) Sistem dan proses kebijakan negara

Sebagai sistem dan proses kebijakan negara, peran administrasi publik terutama dalam fungsi dan proses sebagai proses perumusan sampai evaluasi kebijakan.

f) Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara

Negara didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama sehingga rakyatlah pemilik kedaulatan. Dengan demikian organisasi dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat dalam menyelenggaraan pemerintah daerah.

g) Hukum administrasi publik

Hukum administrasi publik menyangkut dimensi hukum yang bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara.

Selaras dengan hal tersebut Thoha (2005:53) memberikan pendapat dalam Pasolong (2008:19) bahwa orientasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan tersebut mengungkapakan bahwa dalam teori administrasi publik lebih menekankan pada program yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap program dan kegiatan administrasi publik tidak hanya lukisan semata, akan tetapi harus dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.

B. Manajemen Pelayanan Publik

1. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Stoner dalam Sucahyowati (2017:5) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut O'donnel dan Koontz dalam Sucahyowati (2017:5) manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui keliatan orang lain. Sedangkan menurut Donelly dan Ivancevich dalam Winarsih dan Ratminto (2005:1) manajemen pelayanan adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas individu dalam pencapaian suatu tujuan.

Menurut Winarsih dan Ratminto (2005:5) manajemen pelayanan publik diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasi rencana dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan pelayanan. Dalam bentuk barang atau jasa yang bersifat menguntungkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk.

2. Klasifikasi Pelayanan Publik

Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011:20) menjelaskan klasifikasi pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah ada dua kategori yaitu sebagai berikut:

a) Pelayanan kebutuhan dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat meliputi:

1) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah kebutuhan dasar dan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan suatu negara, maka perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan investasi untuk mencapai kesejahteraan sumber daya manusia. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.

2) Pendidikan dasar

Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar. Pendidikan sama pentingnya dengan kesehatan karena merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya. Pelayanan pendidikan yang paling elemnter berawal dari pendidikan dasar. Pemerintahan indonesia membuat program wajib belajar 12 tahun. Pendidikan tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan.

3) Bahan kebutuhan pokok

Pelayanan kebutuhan dasar selain kesehatan dan pendidikan dasar pemerintah juga harus memberikan pelayanan lain yaitu bahan kebutuhan pokok. Bahan kebutuhan pokok masyarakat yaitu beras, jagung, telur, gula, minyak tanah, minyak goreng, daging, garam, susu, sayur-sayuran dan sebagainya. Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok perlu untuk menjamin stabilitas harga dan menjaga ketersediaannya di pasar ataupun digudang dalam bentuk persediaan ataupun cadangan bahan

kebutuhan pokok. Ketidakstabilan harga bahan kebutuhan pokok akan memberikan dampak negative bagi masyarakat dan negara. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus dapat menjaga stabilitas harga-harga umum dan menjamin ketersediaan cadangan bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar atau digudang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat saat terjadi kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

b) Pelayanan umum

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan, selain pelayanan kebutuhan dasar pemerintah juga harus menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

1) Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah dalam bentuk pelayanan penyedia dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), izin mendirikan bangunan, paspor, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

2) Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti: penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, penyediaan jaringan telepon.

3) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti: pendidikan dan pelatihan, penyediaan kebutuhan dasar. Konsultasi teknologi, layanan perizinan, pemeliharaan kesehatan, jasa pos, penyelenggaraan transportasi, penanggulangan bencana.

3. Azas-Azas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilakukan untuk mencapai kepuasan masyarakat. Instansi sebagai penyedia pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan harus memperhatikan beberapa asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut:

a) Transparansi

Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan dapat difahami oleh siapapun. Pelayanan ini lebih ditekankan pada tindakan dan sikap yang dilakukan oleh pemberi layanan kepada penerima layanan secara nyata, jelas dan terbuka oleh semua pihak.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi dalam pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam hal pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan secara nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan proses umpan balik untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi tersebut.

c) Kondisional

Kondisional yaitu kesesuai dengan kondisi atau kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pelayanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat semaksimal mungkin dengan menyesuaikan kondisi yang pada instansi terkait dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektivitas. Masyarakat berhak untuk memberi kritik dan saran sesuai dengan pendapat mereka saat menerima pelayanan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang baik.

d) Partisipatif

Partisipatif, yaitu pelayanan yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta harapan masyarakat sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan ini lebih mendorong masyarakat untuk lebih peka dalam menerima dan merespon penyelenggaraan pelayanan publik.

e) Kesamaan hak

Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak bersifat diskriminasi dilihat dari aspek apapun seperti agama, ras, suku, golongan dan status sosial. pelayanan ini memberikan pelayanan yang merata untuk semua pihak.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemberi pelayanan harus adil dalam menjalankan kewajiban sebagai pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan.

C. Pelayanan Prima

1. Pengertian Pelayanan Prima

Poerwadarminta dalam Hardiyansyah (2011:11) menjelaskan secara etimologis pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti membantu atau mengurus keperluan seseorang, kemudian pelayanan berarti perihal melayani, servis atau jasa. Sedangkan Menurut Kotler dalam Sinambela (2014:4) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Rahmayanti (2013:16) prima (*excellent*), kata lain sangat baik, terpadu, mengesankan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (*quality nice*) yang meliputi kemudahan, kecepatan, ketepatan, kehandalan dan *emphaty* dari petugas pemberi pelayanan dan penyampaian pelayanan kepada pelanggan yang dapat langsung dirasakan oleh pelanggan pada saat itu juga.

Pelayanan prima berarti melayani dengan standar yang sangat baik untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan ciri khas kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kehandalan yang memenuhi kebutuhan praktis dan kebutuhan emosional pelanggan. Pelayanan prima dalam konteks administrasi publik berarti setiap kegiatan perihal melayani, servis atau jasa dengan standar dan ciri khas yang sangat baik untuk memuaskan masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu pelayanan prima dapat menjadi pedoman bagi organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta dalam hal pelayanan.

2. Tujuan Pelayanan Prima

Menurut Rahmayanti (2013:8) tujuan pelayanan prima adalah:

- a) Mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan.

Pembelotan pelanggan atau berpalingnya pelanggan disebabkan karena kesalahan sumber daya perusahaan dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan. Bentuk pembelotan atau berpalingnya pelanggan disebabkan karena kesalahan dalam:

- 1) Pembelotan nilai: Pembelotan nilai dalam tujuan pelayanan prima diantaranya adalah pelanggan menerima nilai yang kurang baik dari suatu produk serta kualitas harga dan barang tidak sesuai.
 - 2) Pembelotan sistem: Sistem menggambarkan kebijakan atau prosedur yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan pelayanan barang atau jasa kepada pelanggan.
 - 3) Pembelotan karena orang: Pembelotan yang terjadi karena pegawai gagal berkomunikasi dengan pelanggan seperti, cara bicara atau menerima telepon dengan mengabaikan pelanggan, berpakaian tidak rapi, tidak mau senyum, kasar dan tidak peduli.
- b) Memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada konsumennya.

Pelayanan prima dalam pelaksanaannya merupakan pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan dengan ciri khas yang berkualitas. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. Perusahaan akan tetap hidup dalam menghadapi persaingan global

apabila perusahaan tersebut terus melakukan perbaikan dalam kegiatan pelayanan, operasional jasa atau selalu meningkatkan inovasi produk.

D. STRATEGI

1. Pengertian Strategi

Menurut Salusu (2003:85) strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strategeus* dengan kata jamak upaya. *Strategos* berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Menurut McNichols dalam Salusu (2003:101) upaya adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan. Pendapat lain Menurut Coulter (2002:7) di dalam Kuncoro (2014:12) upaya merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dalam industrinya.

Strategi atau upaya merupakan suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Strategi atau upaya sangat penting difahami oleh seluruh pemimpin atau manajer puncak seperti, eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus difahami karena upaya dalam pelaksanaannya tidak hanya dilaksanakan oleh pejabat tingkat tinggi akan tetapi dilaksanakan oleh setiap orang dalam setiap tingkatannya.

2. Tingkat-Tingkat Strategi

Merujuk pada pandangan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) dikutip oleh Salusu (2003:1010) menjelaskan bahwa ada empat tingkatan upaya. Yang keseluruhannya disebut *Master strategy* yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*.

a. *Enterprise Strategy*

Enterprise strategy merupakan suatu upaya yang berkaitan dengan respon masyarakat. Dalam upaya ini terdapat kelompok-kelompok yang interest yang mempunyai tuntutan untuk organisasi. Oleh karena itu dalam upaya ini organisasi dituntut untuk sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. *Corporate Strategy*

Corporate strategy merupakan upaya yang berkaitan dengan misi suatu organisasi, sehingga strategi ini sering disebut sebagai grand strategy yang meliputi bidang-bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Dalam melaksanakan upaya ini suatu organisasi harus memiliki misi yang kuat untuk dapat memajukan organisasi tersebut. Dengan terciptanya misi suatu organisasi maka akan mempermudah organisasi untuk tumbuh dan berkembang serta melaksanakan program-program di masa yang akan datang.

c. *Business Strategy*

Business strategy merupakan suatu upaya yang berkaitan dengan pemasaran yaitu bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Dalam upaya ini organisasi non profit dituntut untuk mendapatkan hati para penguasa, para pengusaha, para politisi dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan upaya dalam

berkembangnya suatu organisasi. Dalam hal ini organisasi publik dituntut untuk dapat melakukan sesuatu yang berbbeda.

d. *Functional Strategy*

Functional strategy merupakan upaya pendukung dan untuk menunjang suksesnya upaya lain. Ada tiga jenis upaya fungsional yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi, fungsi utama upaya ini yaitu mencakup fungsi-fungsi ekonomi seperti keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
2. Strategi fungsional manajemen, fungsi utamanya mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu:

a) *Planning* (perencanaan)

Menurut Soedjadi dalam Syafiie (2006:75) perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Sucahyowati perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat diatas Sutarno dalam Riko (2015:27) untuk menetapkan suatu perencanaan manajer harus mengacu pada empat elemen diantaranya:

1) Tujuan

Tujuan adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai menejer. Tujuan sangat penting dalam perencanaan, karena dalam menyusun suatu rencana, sasaran, target dan tujuan masa depan diwujudkan seperti apa semestinya visi dan misi serta upaya pencapaiannya.

2) Aksi

Aksi merupakan kegiatan spesifik atau tertentu yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan meliputi pengadaan, pengelolaan, pelayanan dan sosialisai.

3) Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia

4) Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan meliputi penugasan dan pengarahan personil untuk melaksanakan rencana yang ada.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Menurut Terry dalam Hasibuan (2014:118-119) *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.*

Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Sedangkan menurut Hasibuan (2014:118) pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan penganturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Menurut Hasibuan (2014:127) langkah-langkah pengorganisasian meliputi:

- 1) Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Kepala dinas mengetahui tujuan organisasi karena dalam menentukan tujuan organisasi kepala dinas menjadi pelindung tujuan tersebut serta dalam menentukan suatu tujuan organisasi masing-masing sub bidang dalam menjalankan kegiatannya bertanggung jawab kepada kepala dinas

- 2) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Mengelompokkan kegiatan-kegiatan, artinya, manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.
- 4) Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan di delegasikan kepada setiap departemen.
- 5) Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen.
- 6) Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindari.
- 7) Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang dipakai, apakah line organization, line and staff organization ataupun function organization. Line and staff karena dalam menjalankan tujuan organisasi kepala dinas dibantu oleh para staf

8) Struktur, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan dalam organisasi.

c) *Staffing* (kepegawaian),

Menurut Sucahyowati (2017:7) *Staffing* (kepegawaian) merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia sejak dari proses perekrutan tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap sumber daya memberikan hasil yang maksimal kepada suatu organisasi. Dalam penempatan tenaga yang tepat pada setiap jabatan hendaknya pemimpin organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyeleksi (reruitment) merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai organisasi.
2. Memberi orientasi adalah penyediaan informasi dasar dalam upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi pegawai di suatu organisasi.
3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan skill atau kemampuan yang dibutuhkan pegawai lama ataupun baru untuk melakukan pekerjaan.

d) *Actuating* (penggerak)

Manurut Syafiie (2006:78) *Actiating* (penggerak) adalah pengupayaan berbagai jenis tindakan agar semua anggota kelompok organisasi berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara

menggerakkan anggota organisasi agar dapat bekerja secara optimal. Menurut Stueart dan Moran dalam Riko (2015:38) ada tiga aspek penting dalam fungsi *actuating* yaitu:

1) Motivasi dan Pengarahan

Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang untuk memberPengarahan bersifat kompleks karena menyangkut manusia dan berbagai tingkah laku. Manusia sebagai individu yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda pula. Agar pengarahan efektif pemimpin harus mengetahui gaya kepemimpinan apa yang dapat memotivasi anggotanya.

2) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada para pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi kepemimpinan dalam manajemen terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

3) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan proses manajemen. Manajemen hanya dapat berjalan melalui pikiran dan kegiatan orang-orang di dalam suatu organisasi. Untuk menjalin hubungan antara pemimpin dan SDM didalam suatu organisasi harus ada bentuk komunikasi yang efektif untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik.

e) *Controlling* (pengawasan)

Menurut Siagian dalam pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan menurut Syafiie (2006:82) pengawasan adalah aktivitas membandingkan, apa yang sedang atau yang

sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Menurut Tjandra (2017:136-137) pengawasan menurut sifatnya, dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Misalnya dengan membuat peraturan-peraturan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan preventive biasanya dilakukan oleh atasan langsung.

2. Pengawasan represif

Pengawasan dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif biasa dilakukan secara mendadak tanpa diberi tahu terlebih dahulu/ secara tiba-tiba.

3. *Checking on the spot*

Pengawasan *Checking on the spot* adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Pengawasan *Checking on the spot* dilakukan dengan tindakan memeriksa buku-buku dan laporan.

f) *Budgeting* (penganggaran)

Menurut Munandar (1995:1) dalam Ahmad (2012:38) penganggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi

yang dinyatakan dalam kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dari pengertian penganggaran mempunyai empat unsur yaitu:

- 1) Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.
 - 2) Meliputi seluruh kegiatan organisasi, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam organisasi.
 - 3) Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan organisasi yang beranekaragam.
 - 4) Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang
3. Strategi isu upaya, fungsi utamanya mengontrol lingkungan organisasi.

E. OTONOMI DAERAH

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Kuncoro (2014:27) secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti aturan. Jadi otonomi dapat diartikan sebagai mengatur atau memerintah. Pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Salam (2007:10) otonomi daerah berarti kesempatan membangun struktur sistem dan pola pikir pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah supaya dapat menyelenggarakan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif. Dalam menjalankan otonomi daerah, suatu daerah berhak menetapkan kebijakan daerahnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Akan tetapi tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 tentang pemerintah daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terbagi menjadi daerah kabupaten atau kota. Daerah kabupaten tersebut dibagi menjadi kelurahan atau desa. Contoh daerah otonom adalah Kota dan Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa daerah daerah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam upaya menyejahterahkan masyarakat dengan memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat di daerah dengan berpedoman

pada undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Maskun dalam Supriatna (1996:43) tujuan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan ekonomi masyarakat setempat
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c) Meningkatkan sosialisasi budaya masyarakat
- d) Untuk demokratisasi

Tujuan otonomi daerah pada intinya adalah untuk menyejahterahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Peran serta masyarakat diharapkan akan memunculkan ide-ide pemikiran yang inovatif, kreatif serta berwawasan kedepan bagi kemajuan suatu daerah. Hal itu juga menunjukkan bahwa adanya keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat mempererat kemajuan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

F. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Ketahanan Pangan

FAO (1997) dalam Hanafie (2010:272) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua masyarakat mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan bagi seluruh rumah tangga dan anggota keluarga agar tidak beresiko untuk kehilangan kedua akses tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mendefinisikan ketahanan pangan sebagai berikut:

ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Rachman dan Ariani (2002:1) mendefinisikan ketahanan pangan merupakan tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari. Pemaparan definisi ketahanan pangan menurut para ahli diatas dapat ditarik benang merah bahwa, ketahanan pangan merupakan situasi dimana masyarakat suatu Negara memiliki akses yang mudah untuk dapat mencukupi tersedianya bahan pangan sampai pada perorangan yang aman dan bergizi, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

2. Indikator Ketahanan Pangan

Suwardjo (1996) dalam Rachman dan Ariani (2002:15-16) mengungkapkan bahwa kondisi ketahanan pangan rumah tangga dapat dicerminkan dengan beberapa indikator antara lain:

- a) Tingkat kerusakan tanaman, ternak, perikanan
- b) Penurunan produksi pangan
- c) Tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga
- d) Proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total
- e) Fluktuasi harga-harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga
- f) Perubahan kehidupan sosial (misalnya migrasi, menjual/menggadaikan harta miliknya, peminjaman)
- g) Keadaan konsumsi pangan (kebiasaan makan, kuantitas dan kualitas)
- h) Status gizi

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sawit dan Ariani (1997) dalam Rachman (2002:16) mengemukakan bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu akses penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh pangan.

G. Pertanian Terpadu

Menurut Hanafie (2010:3) pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam berbagai barang yang diperlukan oleh manusia. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri

Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem Sejalan dengan pendapat tersebut Harahap dkk (2018:4) pertanian terpadu atau *integrated farming* adalah usaha pertanian dengan kelola berkesinambungan, sehingga tidak dikenal limbah sebagai produk sampingan, semua bagian hasil pertanian diasumsikan sebagai produk ekonomis dan semua kegiatan adalah *profit center*.

Insani dalam Harahap (2018:4) mengartikan sistem pertanian terpadu atau *integrated farming sistem* adalah penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha pertanian yang terpadu. Sistem ini mengedepankan ekonomi yang berbasis teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang dihasilkan. Sedangkan Menurut Kholilulloh (2013:2) pertanian terpadu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan berbagai program-program pertanian yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut diwujudkan dalam alur pembangunan yang upayas dan implementatif. Program pertanian terpadu tersebut diimplementasikan dalam tiga program unggulan diantaranya yaitu: program peningkatan kesuburan tanah, program peningkatan produktivitas tanaman, dan program peningkatan dinamika penyuluhan dan dinamika kelompok tani.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan dan upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu. Bogdan dan Taylor dalam Almanshur (2016:13) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut sugiyono (2013:35) penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada fenomena yang berhubungan dengan sebab akibat dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. Metode ini dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan maupun data yang ada dengan lebih mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

Pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan sosial melalui proses berfikir yang terus menerus dalam memahami situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dengan penelitian ini peneliti akan dapat mengenali subjek dan memahami berbagai fenomena-fenomena

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti akan memahami dan berusaha untuk mendeskripsikan secara akurat mengenai upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan dan pertanian terpadu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penetapan masalah yang akan menjadi pusat suatu penelitian. Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian, karena fokus penelitian berfungsi untuk memberikan batasan studi dalam melakukan penelitian. Sehingga studi yang dilakukan tidak terlalu luas dan keluar dari batasan-batasan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Moleong (2006:12) penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu: pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu, dilihat dari: strategi fungsional manajemen, dengan fungsi utamanya mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu:

- a) *Planning* (perencanaan)

Proses perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilakukan oleh Kepala Dinas dengan dibantu para stafnya, dengan tujuan mengubah *mindset* para petani yang selama ini masih bergantung pada penggunaan pupuk kimia.

b) Organizing (pengorganisasian)

Fungsi pengorganisasian dalam program pertanian terpadu dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yang berusaha untuk melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Koordinasi dijalankan sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing Dinas.

c) Staffing (kepegawaian)

Proses perekrutan tenaga kerja Dinas Pertanian dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pengembangan potensi pegawai dilaksanakan oleh internal dan eksternal organisasi.

d) Actuating (penggerak)

Pada fungsi *actuating* (penggerak) Dinas pertanian Kabupaten Jombang dalam rangka pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu dilakukan dengan tiga program unggulan yaitu peningkatan kesuburan tanah, peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan dan peningkatan dinamika penyuluhan dan Kelompok Tani

e) Controlling (pengawasan)

Fungsi *controlling* (pengawasan) dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Selain itu Kepala Dinas juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Pengawasan juga dilakukan dari Pemerintah Daerah melalui Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencakup pelaksanaan terhadap peraturan pemerintah daerah dan kinerja aparatur

f) Budgeting (penganggaran)

Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2 atau biasa disebut dengan APBD Kabupaten. Dalam menghindari penyelewengan anggaran dilakukan suatu rencana dengan jumlah anggaran dalam satu tahun kebutuhan organisasi, karena semua anggaran harus direncanakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan dan pertanian terpadu dilihat dari:

a) Faktor pendukung:

1. Petani pengelola
2. Adanya kepemilikan lahan
3. Tingkat teknologi
4. Petugas Penyuluh Lapangan yang handal

b) Faktor penghambat pelaksanaan program pertanian terpadu

1. Kendala administrasi dan kelembagaan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat
3. Kepemilikan lahan relatif sempit
4. Penurunan hasil pertanian

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan suatu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitiannya. Sedangkan situs penelitian adalah tempat yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat mendapatkan data dan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian karena Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbasis pertanian dan penduduk yang dominan bermata pencaharian sebagai petani. Situs penelitiannya adalah di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.170, Mojongapit, Kec.Jombang, Kabupaten Jombang, Tlp. (0321) 861246 Fax (0321) 085171 Jawa Timur 61413, yang merupakan SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang pembangunan pertanian serta memiliki program pertanian terpadu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder sangat diperlukan oleh peneliti untuk ketepatan berbagai informasi yang relevan dengan data mengenai variabel-variabel penelitian. Menurut Arikunto (2006:129) bahwa jenis data dalam penelitian terbagi menjadi berikut:

1. Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut dapat diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pegawai dinas pertanian Kabupaten Jombang sebagai berikut:
 - a. Bapak Rudi Priono sebagai Koordinator Fungsional Penyuluh Dinas Pertanian
 - b. Bapak Anasrul Hakim sebagai Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian
 - c. Bapak Hardi sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Peternakan
 - d. Bapak Rendy sebagai Koordinator Penyuluh dari Dinas Perikanan
 - e. Ibu Endah sebagai Kepala Bidang Pelaporan dan Program Dinas Pertanian
 - f. Bapak Sukisno sebagai Kepala Bagian Umum Dinas Pertanian
 - g. Bapak Suanto sebagai Tokoh masyarakat
2. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2016 dan data statistic Kabupaten Jombang dalam angka tahun 2013-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam

mendapatkan data dan informasi, terutama dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan sesuai dengan keadaan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Sugiyono (2013:225) secara umum membagi empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dimana peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kemudian narasumber akan menjawab pertanyaan yang di berikan oleh peneliti. Teknik wawancara bertujuan untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang yang akan di wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah mengetahui informasi yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara dan alat penunjang sebagai alat untuk membantu proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berdasarkan berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, gambar, sketsa dan lain-lain.

4. Trigulasi

Trigulasi merupakan teknik penelitian yang bersifat menggabungkan data dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Menurut Sugiyono (2013:205) teknik trigulasi data dilakukan dengan menggabungkan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama dan serempak.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun instrument data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Peneliti memegang peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Dimana dalam sebuah penelitian dibutuhkan seorang peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti sebagai pedoman peneliti untuk melakukan wawancara dengan narasumber supaya dalam melakukan wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal serta wawancara yang dilakukan sesuai topik yang telah ditetapkan.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat tulis, alat perekam dan alat bantu lainnya untuk mendapatkan informasi secara akurat sesuai dengan yang diinginkan dalam melakukan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses dan penyusunan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dari catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dan Saldana (2014:33) yang mana di dalamnya terdapat empat tahap dalam metode analisis data, diantaranya:

1. Pengumpulan data

Penyajian data merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan diantaranya wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian dilakukan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Kondensasi data

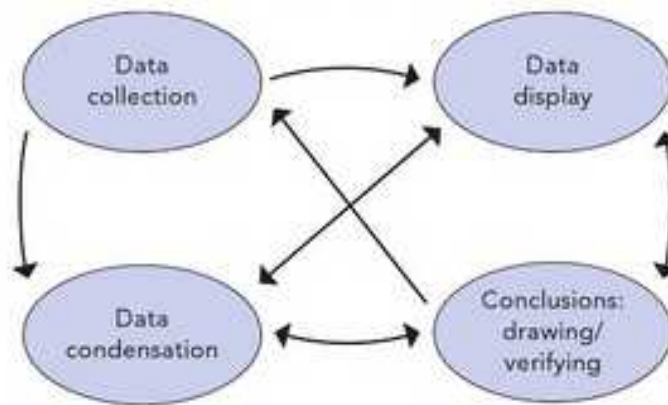
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data yang masih mentah yang di dapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dengan cara data yang sudah diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan kemudian diuraikan atau seperti laporan yang secara legkap dan terisi. Laporan lapangan tersebut kemudian di sederhanakan lagi dan dirangkum sesuai dengan pokok-pokok topik yang berkaitan, kemudian di fokuskan pada tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisis data selanjutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan adanya kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa gambar, grafik, bagan dan berbagai jenis tabel. Dengan melihat penyajian data peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan kedepannya.

4. Kesimpulan atau Verifikasi data

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Data yang muncul dari penelitian harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya supaya data yang dihasilkan dari proses penelitian benar-benar valid. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas maka dalam hal penyajian data ini peneliti akan mengacu pada poin-poin diatas. Sehingga diharapkan dalam proses penelitian nanti bisa lebih terarah dan tidak keluar dari fokus penelitian. Oleh karena itu dapat di gambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. *Components of data analysis: Interactive Model*
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses pengambilan data mengenai objek penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk penelitian dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan menghasilkan sebuah kesimpulan akhir. Untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya mengenai upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu yang dijalankan oleh Dinas Pertaian Kabupaten Jombang, maka lokasi penelitian secara umum yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah Kabupaten Jombang.

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

a. Sejarah Kabupaten Jombang

Jombang termasuk Kabupaten yang masih tergolong muda setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, yang ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu: Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. Menurut sejarah konon dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu desa Tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian Barat, sedang letak gapura sebelah selatan di desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri candinya. Cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung,

Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu dan masih banyak lagi).

Candi Ngrimbi merupakan Salah Satu Peninggalan Sejarah di Kabupaten Jombang, alamatnya di Pulosari Bareng Bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan (salah satu *onderdistrict afdeeling* Jombang) pada tahun 1880. Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *onderdistrict afdeeling* Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto.

Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah dikelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tri Dharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700. Konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu yang berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di Kota Jombang dan berbagai

hal lain, semuanya merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang.

b. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jombang



Gambar 2. Peta Kabupaten Jombang
Sumber: www.jombangkab.go.id

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berlokasi pada Provinsi Jawa Timur bagian barat yang mempunyai batas langsung dengan beberapa Kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang berada pada lintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada diantara $112^{\circ} 03' 46''$ sampai $112^{\circ} 27' 21''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' 48''$ sampai $7^{\circ} 46' 41''$ Lintang Selatan, yang mempunyai luas wilayah 115.950 Ha atau sama dengan 1.159,5 Km². Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 Desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian ± 350 Meter

dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian > 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang ada di Kecamatan Wonosalam.

Kabupaten Jombang memiliki wilayah yang upayas, karena berada dibagian tengah Jawa Timur dan dilintasi jalan arteri Surabaya-Madiun dan jalan kolektor Malang-Babat. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah pelajar serta industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Ibukota Kabupaten Jombang berada pada ketinggian ± 44 meter diatas permukaan laut dan secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area Yaitu:

- a) Kawasan utara, bagian pegunungan kapur kendeng yang sebagian besar mempunyai fidiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi kecamatan Plandaan, Kabuh, Kudu, dan Ngusikan.
- b) Kawasan tengah, sebelah selatan sungai brantas, sebgian besar merupakan tanah pertanian yang bercocok tanam seperti padi dan palawija, karena irigasinya cukup, meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perah, Diwek, Gudo, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
- c) Kawasan selatan, merupakan tanah penguungan yang ditanami dengan perkebunan, meliputi Kecamatan Wonosalam, Bareng, Mojowarno, dan Ngoro.

Secara administrasi Kabupaten Jombang mempunyai 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Dilihat dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki Jumlah terbanyak yaitu 21 desa. Paparan administrasi Kabupaten Jombang untuk lebih memperjelas data disajikan pada tableberikut ini:

Tabel 4. Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Desa	Dusun
1	Bandar Kedung Mulyo	32,50	11	42
2	P e r a k	29,05	13	36
3	G u d o	34,39	18	75
4	D i w e k	47,70	20	100
5	N g o r o	49,86	13	82
6	Mojowarno	78,62	19	68
7	Bareng	94,27	13	50
8	Wonosalam	121,63	9	48
9	Mojoagung	60,18	18	60
10	Sumobito	47,64	21	76
11	Jogoroto	28,28	11	46
12	Peterongan	29,47	14	56
13	Jombang	36,40	20	72
14	Megaluh	28,41	13	41

15	Tembelang	32,94	15	65
16	Kesamben	51,72	14	61
17	K u d u	77,75	11	47
18	Ngusikan	34,98	11	39
19	P l o s o	25,96	13	50
20	K a b u h	97,35	16	87
21	Plandaan	120,40	13	57
	Jumlah	1.159,50	306	1 258

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2017

Berdasarkan pemaparan data dari tabel bisa dilihat bahwa terdapat 3 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan 121,63km² yang mempunyai 9 desa dan 48 dusun, selain itu wilayah terluas lainnya adalah Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 km² yang mempunyai 13 desa dan 57 dusun dan selanjutnya adalah Kecamatan Kabuh yang mempunyai Luas 97,35 km² dengan 16 desa dan 87 dusun.

c. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

1) Visi

Visi merupakan arah kedepan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Jombang harus dibawa dan dibangun serta berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu tujuan atau arah yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang, yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai

luhur yang diikuti oleh semua komponen *stakeholders*. Berpedoman atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan berisikan tantangan yang berada dimasa yang akan datang, maka visi Kabupaten Jombang adalah:

" Jombang Sejahtera Untuk Semua"

Penjelasan Visi dalam rumusan Visi Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: Sejahtera, adalah suatu masyarakat mempunyai kemampuan dan kompetensi dimasa yang akan datang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan juga perwujudan keinginan akan kebutuhan masyarakat yang merupakan pertanggungjawaban dari seluruh *stakeholder*, pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mampu meningkatkan taraf hidupnya.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi. Misi mempunyai fungsi sebagai pemrsatu gerak, langkah dan tindakan yang riil terhadap seluruh komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa memperhatikan mandat yang diberikannya.

Penjelasan Misi Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup social dan beragama
2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

d. Demografi Kabupaten Jombang

Penduduk merupakan salah satu unsur pendukung dalam menggerakkan pembangunan. Penduduk dapat mendukung dalam menggerakkan pembangunan apabila memiliki kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, apabila kualitas sumberdayanya masih rendah maka hal tersebut akan menjadi permasalahan. Jumlah penduduk kabupaten Jombang menurut dinas kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2016 sebesar 1.371.952 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 692.421 jiwa dan penduduk perempuan 679.076 jiwa. Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Jombang untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Penduduk (orang)				
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandar Kedung Mulyo	22.203	22.273	44.476
2	P e r a k	26.341	26.882	53.223
3	G u d o	25.545	26.190	51.752
4	D i w e k	54.378	53.422	107.800
5	N g o r o	35.569	35.569	70.698
6	Mojowarno	45.806	44.904	90.261
7	Bareng	25.278	25.841	51.119
8	Wonosalam	16.372	15.997	32.369
9	Mojoagung	39.333	39.231	78.611
10	Sumobito	41.601	41.518	83.119

11	Jogoroto	35.346	34.970	70.316
12	Peterongan	34.233	34.761	68.994
13	Jombang	62.698	65.369	128.067
14	Megaluh	18.680	19.111	37.791
15	Tembelang	25.503	25.860	51.363
16	Kesamben	30.840	31.325	62.165
17	K u d u	14.095	14.489	28.584
18	Ngusikan	10.610	10.907	21.517
19	P l o s o	19.805	20.048	39.853
20	K a b u h	19.444	20.286	39.730
21	Plandaan	17.567	17.928	35.495
	Jumlah	620.307	626.881	1.247.303

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jombang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2017

Berdasarkan pemaparan data dari tabel bisa dilihat bahwa jumlah seluruh penduduk di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebanyak 1.247.303 jiwa. Terdiri dari penduduk laki laki berjumlah 620.307 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 626.881 jiwa. Penduduk paling banyak di kabupaten jombang dimiliki oleh Kecamatan Jombang, dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 107.800 jiwa, yang memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 62.698 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 65.369 jiwa.

2. Gambaran umum Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

a) Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

1) Visi

Mewujudkan petani sejahtera melalui pertanian berkelanjutan

Arti yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan adalah suatu perbuatan menjadikan rencana dan sasaran yang ingin dicapai benar-benar ada atau terealisasi.
- b. Petani adalah orang yang menjalankan rangkaian kegiatan di bidang pertanian utamanya dalam berusaha tani.
- c. Sejahtera adalah kondisi dimana orang-orang yang berada di dalamnya dalam keadaan lebih baik atau makmur.
- d. Melalui adalah jalan yang harus di tempuh untuk mencapai rencana dan sasaran.
- e. Pertanian adalah rangkaian kegiatan di bidang pertanian mulai dari hulu sampai hilir dalam upaya pembudidayaan tanaman (segala hal yang berkaitan dengan tanam menanam), produksi dan pengolahan hasil produksinya.
- f. Berkelanjutan adalah pelaksanaan system yang terintegrasi antara praktek produksi dengan pemanfaatan sumberdaya secara efisien.

2) Misi

Misi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas agrosistem
- b. Memantapkan kelembagaan petani dan kegiatan penyuluhan
- c. Meningkatkan efisiensi usaha tani
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

b) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

1) Pembentukan

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

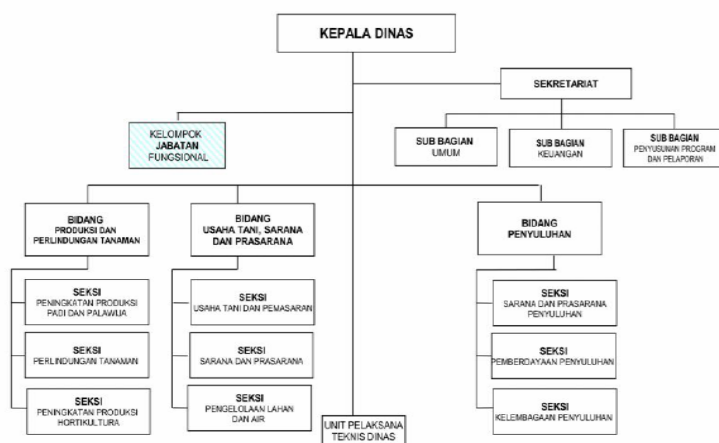
- a. Perumusan dan penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pertanian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian.
- c. Pelaksanaan usaha pencegahan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan, konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan.

- e. Pelaksanaan pemetaan, pengelolaan, pengaturan, pengawasan, penerapan tataguna lahan pertanian dan kawasan pertanian terpadu.
- f. Penetapan sentra komoditas pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan pertanian sesuai kemampuan sumberdaya lahan.
- g. Peningkatan pengelolaan air irigasi dan konservasi sumber-sumber air.
- h. Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- i. Pengawasan peredaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan, penyaluran sarana dan prasarana produksi pertanian.
- j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha disektor pertanian.
- k. Pelaksanaan bimbingan, pengembangan, pemberdayaan, pengendalian dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.
- l. Pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis peningkatan produksi usaha tani dan perlindungan tanaman.
- n. Pelaksanaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian.
- o. Pelaksanaan bimbingan pemasaran, promosi dan penyebaran informasi pasar hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- p. Pelaksanaan penyusunan statistik dan penerapan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura.
- q. Pelaksanaan dan pengembangan laboratorium penguji sektor pertanian.

- r. Pelaksanaan perencanaan, penerapan, kebijakan, pedoman kelembagaan dan pengembangan penyuluhan, serta persyaratan sertifikasi/akreditasi dan mutasi pejabat penyuluh pertanian.
- s. Pelaksanaan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.
- t. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang pertanian.
- u. Pengelolaan tugas kesekretariatan.
- v. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian terdiri dari Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekertaris dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Kepala Seksi. Sebagaimana terlihat dalam bagan susunan organisasi. Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang:



Gambar 3: Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Dalam melaksanakan peran upayanya, tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1) Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Dinas.
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas.
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan.
- g. Penyusunan standar pelayanan minimal lingkup unit kerja.
- h. Penyiapan data dan informasi kepastakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset.

- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga.
- j. Pelaksanaan system pengawasan melekat.
- k. Penyusunan dan pelaksanaan system informasi lingkup Dinas.
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan.
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

2) Sub bagian umum

Sub bagian umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional.
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan surat (surat menyurat) dan kearsipan.
- d. Menyusun standard pelayanan minimal dinas.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor.
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas.
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor.

- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas.
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas.
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

3) Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya.
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Dinas.
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

4) Sub bagian penyusunan program dan pelaporan

Sub bagian penyusunan program dan pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran.
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pertanian.
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang pertanian.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program anggaran.
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pertanian.
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya.
- h. Mengelola, mengembangkan data dan system informasi lingkup Dinas.
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

5) Bidang produksi dan perlindungan tanaman

Tugas pokok bidang produksi dan perlindungan tanaman adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, di bidang peningkatan produksi padi dan palawija, perlindungan tanaman serta peningkatan produksi hortikultura. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang produksi dan perlindungan tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program petunjuk teknis dan pedoman dalam rangka peningkatan produksi padi dan palawija, perlindungan tanaman serta peningkatan produksi hortikultura.
- b. Penyiapan bahan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida organik dan bahan organik.

- c. Penyiapan bahan penyusun program penangkaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, pengadaan, penyaluran benih, pembinaan dan pengelolaan Balai Benih Dinas serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- d. Penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- e. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi dan penganekaragaman tanaman kepada petani.
- f. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman.
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida.
- h. Penyiapan bahan perencanaan logistic, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, kios pestisida dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan ala, bahan dan biaya.
- i. Pelaksanaan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi tanaman pangan dan hortikultura.

6) Seksi peningkatan produksi padi dan palawija

Seksi peningkatan produksi padi dan palawija, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk operasional tentang penggunaan pupuk berimbang, pengadaan dan peredaran benih padi dan palawija serta menyiapkan materi

bimbingan dalam pemanfaatan dan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

- b. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pengadaan, dan penyaluran benih, untuk mendapatkan data yang akurat.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dibidang pengadaan, peredaran dan penyaluran benih sebagai bahan evaluasi dan pemecahan masalah yang tepat dan cepat.
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pedagang dan penangkaran benih dengan memberikan arahan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mendukung peningkatan produksi padi dan palawija.
- e. Melaksanakan bimbingan dengan cara demonstasi uji lapang, penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- f. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket teknologi anjuran sesuai dengan hasil peningkatan produksi padi dan palawija.
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan benih/bibit, lahan dan penggunaan teknologi anjuran.

7) Seksi Perlindungan Tanaman

Seksi Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- b. Melaksanakan bimbingan, pemanfaatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada masyarakat.

- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan agroklimat.
- d. Melaksanakan bimbingan jasa perlindungan tanaman.
- e. Melakukan penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan rekomendasi pengendaliannya.
- f. Melakukan pengamanan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi.
- g. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit turunan.
- h. Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
- i. Melakukan bimbingan, pengelolaan dan konservasi agen hayati Melakukan pengawasan penggunaan pestisida.
- j. Menetapkan areal puso dan eksplosif karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta bencana alam banjir dan kekeringan.
- k. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
- l. Mengendalikan eksplosif hama dan penyakit.
- m. Mengadakan pengujian resistensi tanaman maupun hama dan penyakit.
- n. Mengatur dan melaksanakan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian.
- o. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian penyakit tanaman.
- p. Mengelola laboratorium tanah, hama dan penyakit.

- q. Melaksanakan pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pestisida.

8) Seksi Peningkatan Produksi Hortikultura

Seksi Peningkatan Produksi Hortikultura, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk operasional tentang pembinaan dan penggunaan pupuk berimbang, benih sebar, pengadaan dan peredaran benih anaman hortikultura serta menyiapkan materi bimbingan dalam pemanfaatan dan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- b. Melaksanakan evaluasi dengan cara monitoring terhadap pengadaan, dan penyaluran benih, penerapan teknologi dan penyebarluasan tanaman bergizi untuk mengetahui tingkat pencapaian target.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dibidang pengadaan, peredaran dan penyaluran benih sebagai bahan evaluasi dan pemecahan masalah yang tepat dan cepat.
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pedagang dan penangkaran benih denga memberikan arahan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mendukung peningkatan produksi hortikultura.
- e. Melaksanakan bimbingan dengan cara demonstrasi uji lapang, penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- f. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket teknologi anjuran sesuai dengan hasil peningkatan produksi hortikultura.

- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan benih/bibit, lahan dan penggunaan teknologi anjuran.

9) Tugas pokok Bidang Usaha Tani, Sarana dan Prasarana

Tugas pokok Bidang Usaha Tani, Sarana dan Prasarana adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Usaha tani dan pemasaran, Sarana dan Prasarana serta pengelolaan lahan dan air. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Usaha Tani, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bimbingan tata laksana usaha tani, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil.
- b. Pemberian fasilitas pengembangan agribisnis, permodalan, akses perkreditan, kemitraan dan bentuk hubungan kerjasama lainnya.
- c. Pelaksanaan inventarisasi ketersediaan tenaga kerja, alat mesin pertanian dan perbengkelannya serta pembinaan pengembangan pendayagunaannya.
- d. Pemberian rekomendasi perijinan penggunaan alat mesin pertanian dan alih fungsi lahan pertanian.
- e. Perencanaan kebutuhan benih, pupuk dan pestisida serta pengaturan dan pengawasan penyaluran, penggunaan, penyimpanan dan pemusnahannya.
- f. Pelaksanaan pengembangan, konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan.
- g. Peningkatan pengelolaan air irigasi dan konservasi sumber-sumber air.
- h. Pelaksanaan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi bidang usaha tani.

10) Seksi Usaha Tani dan Pemasaran

Seksi Usaha Tani dan Pemasaran, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional di bidang pengembangan informasi pemasaran, memfasilitasi pemasaran hasil baik pada lembaga pemasaran lokal maupun nasional, pemanfaatan sumberdaya agribisnis dan pasca panen sebagai pedoman dalam pengelolaannya.
- b. Menyusun konsep petunjuk operasional pemberian rekomendasi ijin usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Merumuskan materi pembinaan dan bimbingan usaha tani berdasarkan beberapa referensi dan metode untuk disampaikan dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani dalam pengelolaan tenaga kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi.
- d. Memantau kegiatan usaha tani tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha tani maupun dalam pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- e. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyampaikan hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

11) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kebutuhan benih/bibit, pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan wilayah berdasarkan kebutuhan komoditas binaan.

- b. Mengatur, mengawasi, mengevaluasi dan mencari pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perencanaan, penyaluran, penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan (afkir) benih dan pupuk.
- c. Mengusahakan dan mengatur ketersediaan stok untuk tercukupinya kebutuhan benih, bibit, pupuk dan pestisida.
- d. Menginventarisasi dan membina serta mengembangkan ketersediaan tenaga kerja, alat mesin pertanian dan perbengkelannya.
- e. Memfasilitasi efektifitas pemanfaatan tenaga kerja, alat mesin pertanian dan perbengkelannya.
- f. Memberikan rekomendasi perizinan penggunaan alat mesin pertanian.

12) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air

Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan lahan dan air.
- b. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- c. Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi saluran tersier dan jaringan irigasi desa.
- d. Menginventarisasi penggunaan lahan, memfasilitasi usaha pengembangan lahan dan peningkatan intensitas pertanaman serta memberikan rekomendasi menginventarisasi alih fungsi lahan.
- e. Memberikan bimbingan usaha konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

- f. Meningkatkan sarana transportasi/jalan menuju lahan pertanian (dalam kawasan lahan pertanian).
- g. Meningkatkan pengelolaan air irigasi dan memfasilitasi pengembangan sarannya.
- h. Memfasilitasi usaha konservasi sumber-sumber air serta meningkatkan pengelolaannya.
- i. Melaksanakan pembinaan tentang tata ruang dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agroekosistem.

13) Bidang Penyuluh

Tugas pokok Bidang Penyuluhan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang sarana dan prasarana penyuluhan, pemberdayaan penyuluhan serta kelembagaan penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan penyuluhan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan.
- c. Penyusunan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional.
- d. Pelaksanaan penyuluhan.
- e. Pelayanan administrasi tenaga fungsional yang bertugas di kabupaten.
- f. Pengembangan mekanisme, tatakerja dan metode penyuluhan.

- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan.
- i. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan.
- j. Menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- k. Pemberian fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- l. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- m. Pelaksanaan pembinaan karier dan kepegawaian terhadap para penyuluh.

14) Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan menyiapkan kebijakan semua metode penyuluhan.
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan Penyusunan kebijakan penyuluhan.
- c. Menginventarisasi, mendokumentasi dan menyebarluaskan materi penyuluhan kepada penyuluh.
- d. Menyusun dan menyiapkan kebutuhan penerapan metode penyuluhan antara lain: temu karya, melaksanakan dem dan siaran pedesaan, temu wicara, rembug tani, mimbar sarasehan, penyuluhan massal, karya wisata, lomba produk pertanian, magang, kursus tani, obrolan, lomba penyuluh, lomba kelompok, penilaian kelas kelompok sesuai tingkatan pengetahuan dan ketrampilan pelaku utama maupun pelaku usaha.

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas semua metode penyuluhan yang dilaksanakan.
- f. Merencanakan dan menyiapkan fasilitas penyuluhan yang dibutuhkan penyuluh sesuai dengan perkembangan pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Merencanakan kebutuhan biaya eksploitasi sarana dan prasarana penyuluhan.
- h. Merencanakan dan menyiapkan peralatan penyuluhan bagi penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya.

15) Seksi Pemberdayaan Penyuluhan

Seksi Pemberdayaan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis, informasi dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani/ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis bekerja sama dengan lembaga terkait.
- c. Menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani melalui pelatihan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan lomba produk pertanian.
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pengembangan sumberdaya manusia penyuluh.
- f. Melaksanakan supervisi pengembangan penyuluhan pertanian.

16) Seksi Kelembagaan Penyuluhan

Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi keberadaan kelembagaan petani dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan.
- b. Melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kelas kelembagaan petani melalui kegiatan perlombaan dan bentuk-bentuk kompetisi lain yang bersifat mendidik.
- c. Menyiapkan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan petani.
- d. Memfasilitasi pembentukan dan proses legitimasi kelembagaan petani.
- e. Melaksanakan identifikasi, analisis kebutuhan pendidikan dan ketrampilan penyuluh berdasarkan kondisi daerah

d) Sumber Daya Manusia

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh 114 personil PNS yang terdiri dari 33 orang anggota fungsional umum dan 81 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai atau aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan II sebanyak 13 orang, Golongan III sebanyak 88 orang, dan Golongan IV sebanyak 13 orang dari 114 orang pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Berikut ini merupakan

tabel komposisi pegawai menurut golongan di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang:

Tabel 6. Komposisi Pegawai Menurut Golongan/Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah PNS
1	Golongan I	-
2	Golongan II	13 orang
3	Golongan III	88 orang
4	Golongan IV	13 orang
Jumlah		114 orang

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 9 Desember 2018

Selain itu jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berpendidikan Magister (S2) 6 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 60 orang, berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 9 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 5 Orang PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Berikut ini merupakan komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang:

No	Pendidikan	Jumlah PNS
1	S3	-
2	S2	4 orang
3	S1	83 orang

4	D4	-
5	D3	14 orang
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA Sederajat	13 orang
9	SMP Sederajat	-
10	SD Sederajat	-
11	Tidak sekolah	-
Jumlah		114 orang

Tabel 7. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Sumber. Dina pertanian kabupaten jombang 9 Januari 2018

Jumlah Pegawai PNS di lingkungan Dinas Pertanian berdasarkan Jabatan terdiri dari 33 Orang sebagai Fungsional Umum dan 81 Orang Fungsional Penyuluh. Berikut ini merupakan komposisi pegawai menurut jabatan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang:

Table 8. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah PNS
1	Fungsional umum	33
2	Fungsional penyuluh	81
Jumlah		114 orang

Sumber: Dina Pertanian Kabupaten Jombang 9 Januari 2018

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jombang juga didukung oleh 64 Orang Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

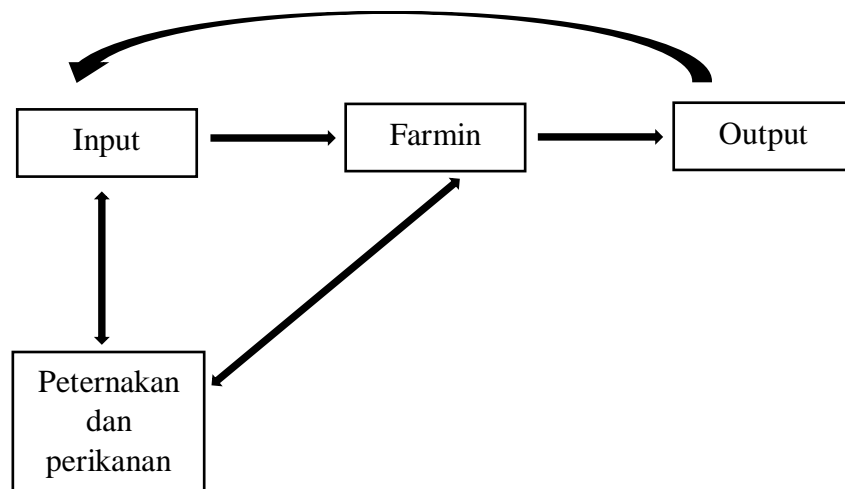
3. Gambaran Umum Pertanian Terpadu

Pertanian terpadu dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang karena adanya penurunan kesuburan tanah yang salah satunya ditandai dengan penurunan kandungan bahan organik. Program ini diawali dengan pembangunan laboratorium terpadu pada tahun 2009. Pembangunan laboratorium terpadu adalah untuk mengontrol kondisi tanah yang ada di Kabupaten Jombang. Setelah dilakukan pembangunan laboratorium terpadu, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang langsung mencoba untuk melakukan uji hipotesis kondisi tanah persawahan. Uji hipotesis dilakukan dengan mengambil sampling tanah sawah di beberapa daerah di Kabupaten Jombang.

Hasil dari uji hipotesis kondisi tanah menunjukkan bahwa bahan organik tanah hanya 1,2% dari kandungan bahan organik tanah yang awalnya adalah 5,%. Dari hasil uji hipotesa tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berusaha untuk melakukan suatu gerakan-gerakan yang berorientasi pada kesuburan tanah, salah satunya dengan gerakan pertanian organik. Pertanian organik dapat dijalankan secara efektif dengan terlaksananya program pertanian terpadu. Program pertanian terpadu adalah pertanian yang terintegrasi dari beberapa sub sektor terkait yang saling melengkapi dan mendukung. Pertanian terpadu merupakan konsep pemanfaatan lahan yang tersedia semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk pertanian yang beraneka ragam dengan kualitas tinggi. Hasil yang beragam dari tiap

komoditas pertanian tersebut diolah kembali untuk sumber masukan energi dalam melakukan aktivitas pertanian lainnya.

Pemanfaatan komponen-komponen pertanian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi yaitu berupa peningkatan hasil produksi yang bersifat ramah lingkungan. Konsep pertanian terpadu ini juga merupakan upaya petani dalam memperbaiki sifat tanah dengan penambahan input bahan organik dari dalam sistem pertanian itu sendiri. Usaha yang dipakai dalam menerapkan pertanian terpadu adalah dengan menggabungkan dua subsistem utama yaitu peternakan dan pertanian. Berikut ini merupakan pola pertanian terpadu dalam mengembalikan kesuburan tanah:



Gambar 4: Pola Pelaksanaan Program Pertanian Terpadu
Sumber: Peneliti 2018

Proses pertanian terpadu dalam upaya mengembalikan kesuburan tanah terdiri dari input sampai ke output yang saling berhubungan. Input yaitu segala sesuatu yang dapat mendukung terlaksananya sector pertanian terpadu. Input meliputi sarana dan prasarana dalam kegiatan farmin (budidaya pertanian) seperti

penyediaan lahan, bibit, pupuk, cangkul, gudang dan lain-lain yang dapat mendukung pertanian dan peternakan. Sehingga menghasilkan output diantaranya produk pertanian (beras, jagung, ketela, kacang, gula, sayuran) dan produk peternakan/perikanan (daging, ikan tawar, gurami, lele dan lain-lain). Sedangkan limbah pertanian seperti jerami padi, jagung, kedelai dapat di jadikan makan sub peternakan. Selanjutnya limbah dari peternakan dapat di kembalikan ke sawah yang digunakan sebagai pupuk organik, sehingga dapat mempercepat keasuburan tanah.

B. Penyajian Data

1. Upaya Dinas Pertanian Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Melalui Program Pertanian Terpadu dilihat dari strategi fungsional manajemen dimana fungsi utamanya mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu:

a. *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) merupakan proses penentuan kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan umum pemerintahan daerah di bidang pertanian. Proses perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilakukan oleh Kepala Dinas dengan dibantu para stafnya. Perencanaan Dinas Pertanian dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu direncanakan secara bersama antara seluruh pemangku kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi

dilapangan sesuai dengan hasil wawancara Pak Rudi selaku Fungsional Penyuluh

Dinas Pertanian menyatakan bahwa:

“Perencanaan pertanian terpadu direncanakan hampir semua bidang Dinas Pertanian terkait, dengan semua bidang terlibat dalam rangka mensuport keberhasilan program seperti contoh dalam menjalankan pertanian terpadu perlu adanya sarana prasarana maka bidang sarana prasarana menyediakan fasilitas seperti menyediakan alat pertanian, rumah kompos, sumur cadangan. Bidang produksi dengan menyuport produksi seperti memberi fasilitas pengadaan benih dan bibit tanaman. Bidang pemasaran dengan memberi arahan mengenai pemasaran hasil tanaman pasca panen. Dinas lain yang berkaitan menyuport di satu titik sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing diantaranya peternakan memberi pembinaan berupa pembuatan kandang, kesehatan hewan dll. Dinas Perikanan memberi dorongan seperti bantuan kolam, ikan, dan pembinaan. Jadi Dinas yang berkaitan dengan program pertanian terpadu masing-masing mensuport di satu titik sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)”. (Hasil wawancara tanggal 08 Januari 2018)

Sejalan dengan pernyataan diatas untuk menghadapi isu upayay bidang pertanian dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu. Dinas pertanian melakukan perencanaan dengan tujuan mengubah *mindset* para petani yang selama ini masih bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Bambang sebagai Fungsional Penyuluh Dinas Pertanian menyatakan bahwa:

“Isu pertanian Kabupaten Jombang saat ini yaitu menurunnya tingkat kesuburan tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat produktivitas tanaman. Dari permasalahan tersebut Dinas Pertanian mencoba membuat visi mewujudkan petani sejahtera melalui pertanian berkelanjutan, yang berusaha untuk membudidayakan petani dengan budidaya pertanian terpadu. Budidaya pertanian terpadu dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan tujuan merubah *mindset* atau pola pikir petani agar mau menerapkan budidaya pertanian terpadu, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melakukan pembekalan kepada petugas-petugas yang dimilikinya dengan ilmu tentang pengembangan pertanian terpadu sehingga ilmu tersebut dapat di transfer kepada para petani. Selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang juga meminta pendampingan kepada para ahli di bidang pengembangan

pertanian terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengaplikasian budidaya pertanian terpadu supaya dapat di pahami oleh para petani sehingga program pertanian terpadu diharapkan dapat diimplementasikan oleh para petani di Kabupaten Jombang”. (Hasil wawancara tanggal 12 Januari 2018)

Pendampingan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan menempatkan para pejabat fungsional penyuluh di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan dan petugas penyuluh fungsional Dinas Pertanian terdiri dari 81 orang. Dalam pelaksanaannya setiap kecamatan terdiri dari tiga sampai empat petugas penyuluh sesuai dengan luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Lebih lanjut oleh Bapak Anasrul Hakim sebagai Koordinator Penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jogoroto menyatakan bahwa:

“ Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menetapkan beberapa kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan upaya atau program, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan suatu tujuan. Salah satunya dengan mengembalikan fungsi balai penyuluh pertanian (BPP) sebagai basis peningkatan kualitas penyuluh dan petani. Penyuluh pertanian berjumlah 81 orang, sedangkan Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan. Jadi setiap kecamatan terdiri dari tiga sampai empat penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi luas wilayah masing-masing kecamatan, sehingga pendampingan dan pengawasan dalam menjalankan upaya atau program Dinas Pertanian Kabupaten Jombang akan lebih efektif dan efisien”. (Hasil wawancara tanggal 12 Januari 2018).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya perencanaan dalam pertanian terpadu dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Jombang. Perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan semua bidang terkait. Selain semua bidang terkait di Dinas Pertanian, dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah juga membutuhkan sinergitas dari Dinas-dinas lain yang terkait dengan pengelolaan ketahanan pangan dan pertanian terpadu seperti Dinas

Peternakan dan Dinas Perikanan yang diharapkan dapat memberikan pelaksanaan kegiatannya untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah di tahun-tahun yang akan datang.



Gambar 5 dan 6. Dokumentasi saat peneliti berdiskusi dan melakukan wawancara di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan BPP Kecamatan Jogoroto.

Sumber: peneliti sendiri

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Hasibuan (2014:118) pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan orang pada setiap aktivitas dan mampu menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas tersebut Menurut Hasibuan (2014:127) langkah-langkah pengorganisasian meliputi:

- 1) Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- 2) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Mengelompokkan kegiatan-kegiatan, artinya, manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.
- 4) Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan di delegasikan kepada setiap departemen.
- 5) Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan padasetiap departemen.

- 6) Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindari.
- 7) Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang dipakai, apakah line organization, line and staff organization ataupun function organization.
- 8) Struktur, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan dalam organisasi.

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yaitu: meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani serta aparaturnya tentang pentingnya pertanian organik, mewujudkan kelembagaan petani dan aparaturnya sebagai basis kegiatan petani dan aparaturnya, meningkatkan produksi melalui inovasi teknologi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, meningkatkan infrastruktur penunjang usaha tani dengan memfasilitasi penguatan modal bagi petani dan memfasilitasi pemasaran hasil produksi petani, untuk mendapatkan harga yang layak. Penetapan pengorganisasian dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan melakukan delapan langkah pengorganisasian yang disebutkan diatas.

Salah satu langkah yaitu peranan perorangan. Peranan perorangan merupakan langkah dimana manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu, supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas. Langkah peranan perorangan sudah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian, akan tetapi masih tetap terjadi tumpang tindih tugas. Tumpang tindih tugas terjadi dikarenakan ada beberapa karyawan yang sudah mengalami pensiun. Tugas karyawan yang sudah pensiun menyebabkan individu lain harus mengerjakannya, terutama individu yang satu departemen.

Tumpang tindih tugas terjadi karena Kepala Dinas Pertanian tidak memiliki kewenangan dalam mengisi jabatan yang kosong di beberapa departemen Dinas

Pertanian Kabupaten Jombang. Pengisian jabatan bisa dilakukan jika adanya perekrutan dari daerah, penetapannya pun berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena adanya Otonomi Daerah, sehingga pengisian jabatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Sukisno sebagai Kepala Bagian Umum menyatakan bahwa:

“Adanya pegawai yang pensiun jadi mau tidak mau kita memanfaatkan tenaga yang ada hingga ada pelantikan pegawai baru dari Pemerintah Daerah, karena kewenangan penuh ada di Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas pun mengetahui hal tersebut, sehingga beberapa karyawan di beberapa departemen tertentu harus melaksanakan tugas karyawan yang sudah pensiun. Berbeda dengan Tenaga Fungsional Penyuluh. Tenaga Fungsional Penyuluh mereka langsung penempatan dari Pusat yaitu dari Kementrian Pertanian”. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018).

Fungsi pengorganisasian dalam pertanian terpadu dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yang berusaha untuk melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Koordinasi dijalankan sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing Dinas. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang bertugas dari proses penanaman sampai menjadi barang setengah jadi sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Dinas peternakan bertugas untuk memberikan arahan dan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas peternakan berupa hewan ternak, kesehatan hewan dan izin usaha ternak, sesuai dengan hasil wawancara Pak Hardi sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Peternakan menyatakan bahwa:

“Sinergitas dari Dinas Perternakan dalam menompang ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu yaitun dengan melalui bantuan yang diberikan

kepada kelompok peternakan yang dibentuk berdasarkan komunitas masing-masing berdasarkan kebutuhan, bantuan kesehatan seperti: pemeriksaan gangguan produksi pada hewan, bantuan vitamin dan obat, perlakuan IB (Inseminasi Buatan) pada hewan, dan bantuan perizinan usaha peternakan. Bantuan dari Dinas Peternakan Langsung diberikan kepada masyarakat melalui kelompok peternakan yang terdapat pada suatu daerah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya dengan mengajukan proposal ke Dinas Peternakan”.(Hasil wawancara 18 Januari 2018)

Koordinasi dalam pelaksanaan pertanian terpadu juga melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pengelolaan ketahanan pangan di Kabupaten Jombang. Koordinasi dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan yang efektif dan efisien, sesuai dengan hasil wawancara dari Pak Rendy sebagai Koordinator Penyuluh dari Dinas Perikanan menyatakan bahwa:

“Peran Dinas Perikanan dalam ketahanan pangan di Kabupaten Jombang yaitu dengan meningkatkan gizi protein masyarakat melalui produksi dengan cara menjaga produksi ikan serta berusaha meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan, memantau harga produksi ikan, serta berusaha untuk mengubah *mindsite* masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jombang mengutamakan sasarannya pada anak-anak. Anak-anak dianggap masih membutuhkan banyak asupan gizi dengan cara mengenalkan mereka dengan produk olahan ikan seperti bakso ikan, krupuk ikan, sosis ikan dll”. (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2018).

Pegorganisasian dalam pertanian terpadu dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama seluruh bidang terkait Dinas Pertanian yang bertugas dari proses penanaman sampai menjadi barang setengah jadi, sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Dinas peternakan bertugas untuk memberikan arahan dan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas peternakan berupa hewan ternak, kesehatan hewan dan izin usaha ternak. Begitupun Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dinas.



Gambar 7. Dokumentasi saat peneliti berdiskusi dan melakukan wawancara terkait program pertanian terpadu di Dinas Perikanan Kabupaten Jombang

Sumber: Peneliti Sendiri

c. *Staffing* (kepegawaian)

Staffing (kepegawaian) merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia sejak dari proses perekrutan tenaga kerja, pengembangan sampai dengan usaha agar setiap sumber daya memberikan hasil yang maksimal kepada suatu organisasi. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 114 personil PNS yang terdiri dari 33 orang anggota fungsional umum dan 81 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jombang juga didukung oleh 64 Orang Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Dalam penempatan personalia pemimpin organisasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyeleksi (reruitment) merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai organisasi.

Proses perekrutan tenaga kerja Dinas Pertanian dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut di karenakan Dinas Pertanian

Kabupaten Jombang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Sukisno selaku Kepala Bagian Umum menyatakan sebagai berikut:

“Perekrutan pegawai semua dinas tidak memiliki kewenang dalam perekrutan pegawai, perekrutan langsung dari kabupaten karena kita sudah Otonomi Daerah, jadi tergantung sama Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Cara mengisi jabatan menunggu pelantikan dari Pemerintah Daerah mengusulkan ke pusat, semua tergantung kewenang Pemerintah Daerah, kecuali 64 tenaga kontrak atau disebut sebagai Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dari pusat (Kementrian)”. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018).

2. Memberi orientasi adalah penyediaan informasi dasar dalam upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi pegawai di suatu organisasi.

Pemberian orientasi kerja pada suatu organisasi diberikan agar pegawai mampu mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan organisasinya. Serta faham dan trampil terhadap tugas yang harus dikerjakan dalam organisasinya. Pada dasarnya orientasi pegawai merupakan salah satu komponen pemberian informasi kepada pegawai baru, yaitu dari penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku di suatu organisasi. Pemberian orientasi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang diadakan oleh Pemerintah Daerah saat awal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pendidikan dan pelatihan dasar menjadi pegawai. Pendidikan dan pelatihan juga diadakan oleh internal organisasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pegawai sesuai dengan kemajuan teknologi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Sukisno bahwa:

“Awal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan pendidikan dan pelatihan dasar yang biasanya dilaksanakan kurang lebih enam bulan. Latihan dasar bertujuan untuk membentuk pegawai yang professional yang dibentuk oleh sikap dan perilaku disimplin pegawai serta menguasai kompetensi teknis

bidang tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas secara professional sebagai pelayan masyarakat”. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018).

3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan skill atau kemampuan yang dibutuhkan pegawai lama ataupun baru untuk melakukan pekerjaan.

Efektifitas pembangunan pertanian memerlukan sinergi semua pihak terkait, baik petani, lembaga pemerintah, swasta serta pihak lain. Para pihak tersebut harus saling mendukung dalam kegiatan usaha tani baik melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, budidaya serta pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian. Seluruh komponen subsistem agribisnis harus berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam melaksanakan usaha tani yang efektif dan efisien yang tentunya hanya bisa dilakukan melalui pendekatan penerapan teknologi tepat guna.

Penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian. Perubahan perilaku petani yang menjadi sasaran penyuluhan adalah hal yang paling mendasar dalam peningkatan kualitasnya. Melalui perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani, diharapkan tingkat adopsi teknologi tepat guna bisa ditingkatkan sehingga peningkatan produksi dan produktivitas pertanian bisa dioptimalkan. Untuk itu dari segi kualitas, diperlukan penyuluh pertanian yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Penyuluh harus cerdas dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapang. Dalam meningkatkan kualitas para pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengadakan pendidikan dan pelatihan. Salah satunya dengan diadakan *outbound* sebagai bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen di

alam terbuka. Berikut hasil wawancara Bapak Sukisno selaku Kepala Bagian Umum bahwa:

“Dalam mengembangkan kemampuan pegawai juga dilaksanakan internal organisasi seperti outbound training sebagai bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka, seminar motivasi kinerja dengan mendatangkan motivator sebagai narasumber, Adanya permintaan perwakilan beberapa pegawai untuk pendidikan dan pelatihan di balai pembimbingan nganjuk karena sebagai wujud kerja sama”. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018).

Staffing (kepegawaian) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 114 personil PNS. Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jombang juga didukung oleh 64 Orang Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang ditempatkan di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian. Untuk itu diperlukan penyuluh pertanian yang handal dan cerdas dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada di lapang.



Gambar 8. Outbound peningkatan kualitas dan perkokoh penyuluh Kabupaten Jombang

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

d. *Actuating* (penggerak)

Actuating (penggerak) merupakan fungsi organisasi yang saling berhubungan antara implementasi dari perencanaan, pengorganisasian serta sumber daya manusia, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Peran seorang manajer sangat penting dalam mengendalikan anggotanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara oleh Pak Rudi selaku Fungsional Penyuluh menyatakan bahwa:

“Pengarahan diberikan oleh Kepala dinas dengan memberi arahan dan motivasi kepada kepala bidang masing-masing dan kepala bidang meggerakkan kelompoknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing karena dalam menjalankan program tidak bisa merucut ke satu orang melainkan perlunya kerja sama di setiap bidang sesuai kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Contoh bidang produksi menyusun kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang produksi untuk mensuport kegiatan pertanian terpadu dengan memberi bantuan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan, alat, pertemuan dan sertifikasi”. (hasil wawancara tanggal 8 Januari 2018).

Pengarahan dan motivasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas tidak cukup kepada kepala bidang masing-masing. Untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien kepala dinas juga memberikan pengarahan kepada pegawai saat apel pagi dilaksanakan. Pengarahan tersebut bertujuan untuk memotivasi para pegawai agar tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara dari Pak Sukisno selaku Kepala Bagian Umum Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Apel pagi yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah untuk membangun dan melatih disiplin para pegawai terhadap jam kerja yang telah ditentukan serta sebagai media *sharing* informasi kepada pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga apel pagi bukan hanya kegiatan

berkumpul dan berbaris rapi pada umumnya akan tetapi sebagai media positif Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan motivasi kepada pegawai agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal”. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018)

Pada fungsi *actuating* (penggerak) Dinas pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu dilakukan dengan tiga program unggulan yaitu peningkatan kesuburan tanah, peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan dan peningkatan dinamika penyuluhan dan Kelompok Tani. Sesuai dengan hasil wawancara dari Pak Rudi selaku Fungsional Penyuluh menyatakan bahwa:

“Upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu dilakukan dengan tiga program unggulan yaitu peningkatan kesuburan tanah, peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan dan peningkatan dinamika penyuluhan dan kelompok tani. Peran dinas pertanian terkait dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan pemberian dukungan berupa pendamping-pendamping, pemberian informasi dan motivasi kepada kelompok tani, pemberian bantuan alat pertanian seperti mesin tanam, alat pembuat pupuk organik dan lain-lain”.(Hasil wawancara tanggal 8 Januari 2018)

1) Peningkatan Kesuburan Tanah

Peningkatan kesuburan tanah dilakukan melalui pertanian berkelanjutan yang diwujudkan dengan program-program kegiatan pertanian yang berorientasi pada kesuburan tanah salah satunya dengan melakukan konsep pertanian organik. Dalam meningkatkan kesuburan tanah melalui pertanian organik para petani dilatih untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Melalui sosialisasi kepada Gapoktan/Poktan pegawai Dinas Pertanian menjelaskan cara mengganti penggunaan pupuk kimia dengan bahan organik seperti: pengembalian sisa panen, pemberian kotoran hewan dan pemberian pupuk hijau. Staf Fungsional Penyuluh, Bapak Rudi menjelaskan

lebih lanjut mengenai cara yang dapat ditempuh dalam mendapatkan bahan organik yaitu:

“Berikut ini beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan bahan organik yaitu:

- i. Pengembalian sisa panen
Pengembalian sisa panen dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah yaitu dengan tidak membakar limbah panen seperti, batang jagung, jerami padi dan sisa-sisa panen lainnya, karena dengan membakar sisa panen maka akan mengakibatkan unsur hara yang ada di tanah akan berkurang. Sisa-sisa panen sebaiknya tidak dibakar akan tetapi diolah menjadi pupuk kompos dan dikembalikan lagi ke sawah.
- ii. Pemberian kotoran hewan
Kotoran hewan atau Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, kerbau dan burung. Kotoran hewan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan cara menaburkan kotoran hewan ternak ke sawah. Limbah ini sebaiknya diberikan menjelang waktu tanam.
- iii. Pemberian pupuk hijau
Pupuk hijau berasal dari sisa-sisa tanaman (sisa panen) atau tanaman yang ditanam secara khusus sebagai penghasil pupuk hijau atau yang berasal dari tanaman liat yaitu tanaman yang ada di area pinggir lahan, jalan atau saluran irigasi”. (Hasil wawancara tanggal 9 Januari 2018).

Selain cara-cara untuk mendapatkan bahan organik yang sudah disosialisasikan oleh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Dalam upaya terlaksananya kegiatan pengembalian kesuburan tanah dan pelayanan kepada masyarakat Dinas Pertanian memberikan bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat seperti alat-alat pertanian yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Contoh bantuan alat pertanian yang diberikan kepada masyarakat antara lain: mesin tanam, mesin panen, granuator, traktor, bantuan benih, dan pestisida. Bapak Bambang selaku Fungsional Penyuluh menyatakan bahwa:

“Dinas Pertanian sebagai perantara dari pemerintah daerah yang berkewajiban melakukan pelayanan masyarakat dengan baik terutama dalam bidang pertanian. Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kepada masyarakat. Selain melakukan

sosialisasi kepada Gapoktan/Poktan Dinas Pertanian juga memberikan bantuan alat-alat penunjang pertanian seperti: mesin tanam, mesin panen, granuator, traktor, bantuan benih, dan pestisida dan juga modal dalam terselenggaranya kegiatan pertanian. Bantuan alat atau sarana prasarana diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut”. (Hasil wawancara 9 Januari 2018). Berikut ini merupakan contoh alat yang diberikan kepada masyarakat:



Gambar 9. Penyerahan bantuan alat pertanian oleh pemerintah Kabupaten Jombang kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian Melalui Optimalisasi Lahan

Kegiatan optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Optimalisasi lahan dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Kegiatan optimalisasi lahan dilakukan dengan intensifikasi lahan dan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi lahan merupakan pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi lahan

dilakukan dengan mencari lahan pertanian baru. Hal tersebut juga diungkapkan oleh

Bapak Rudi selaku pegawai Penyuluh Fungsional bahwa:

“Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan dua cara yaitu: Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memanfaatkan lahan yang sudah ada. Adapun langkah-langkah intensifikasi pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah: pengairan secara teratur, penggunaan bibit yang unggul, pemupukan secara teratur sampai menyerap ke bagian akar, pemberantasan hama penyakit pada tanaman, pengolahan setelah panen, perlindungan lahan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sedangkan Ekstensifikasi pertanian usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mencari lahan-lahan baru pertanian baru yang bisa ditanami tanaman dan menghasilkan nilai tambah dari hasil panen tersebut dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti memanfaatkan hutan, rawa-rawan dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melakukan ekstensifikasi lahan pertanian adalah dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan melakukan kerjasama dengan perhutani Kerja sama yang dilakukan Dinas Pertanian dengan perhutani adalah untuk memanfaatkan fungsi hutan dengan melibatkan kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di daerah hutan Kabupaten Jombang seperti Wonosalam, Kabuh, Plandaan, Bareng). Hutan yang sudah ditanami jati, pinus disisipi dengan tanaman lain seperti jagung, kedelai, kacang tanah dll.” (Hasil wawancara 9 januari 2018)



Gambar 10. Intensifikasi lahan melalui pemberantasan hama penyakit pada tanaman

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang



Gambar 11. Ekstensifikasi lahan melalui pemanfaatan lahan pekarangan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

3) Peningkatan Dinamika Penyuluhan dan Kelompok Tani

Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian melakukan beberapa kegiatan diantaranya: Gerakan pembentukan limbah organik, Gerakan penggunaan MOL dan Bokashi, Gerakan pengembangan agens hayati, Gerakan penerapan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pegawai Dinas Pertanian melibatkan beberapa actor seperti: beberapa masyarakat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan/poktan), Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA/GHIPPA), Penyuluh Swadaya, Kios Pupuk/Distributor, Lembaga Permodalan, Praktisi Pertanian. Bapak Bambang selaku pegawai Penyuluh Fungsional menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Kabupaten Jombang terdiri dari 1096 Gapoktan/Poktan yang ada di masing-masing desa. Dalam upaya meningkatkan dinamika penyuluhan dan dinamika kelompok tani Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melakukan beberapa model kegiatan diantaranya sebagai berikut: Gerakan pembentukan limbah organik, Gerakan penggunaan MOL dan Bokashi, Gerakan pengembangan agens hayati, Gerakan penerapan teknologi tepat guna. Gerakan penyuluhan diatas bertujuan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, meningkatkan keseimbangan agroekosistem dan meningkatkan efisiensi usaha tani dengan harapan terciptanya pertanian yang sejahtera dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Dalam menjalankan kegiatannya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melibatkan beberapa masyarakat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan/poktan), Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA/GHIPPA), Penyuluh Swadaya, Kios Pupuk/Distributor, Lembaga Permodalan, Praktisi Pertanian”. (Hasil wawancara 9 Januari 2018).

e. **Controlling (pengawasan)**

Controlling (pengawasan) adalah proses memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan mengukur hasil dengan membandingkan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya suatu penyimpangan dan menyusun *feedback* untuk perbaikan organisasi dimasa yang akan datang. Pengawasan dapat dilaksanakan pada proses perencanaan, pengorganisasian, personalia, pelaksanaan dan penganggaran. Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Kepala Bidang, Kepala Dinas, pemerintah daerah dan inspektorat. Bapak Rudi selaku Fungsional Penyuluh menyatakan bahwa:

“Kepala Dinas melakukan pengawasan di Kantor dan di lapangan. Pengawasan di kantor dilakukan guna mengontrol disiplin pegawai melalui apel pagi pada hari senin sampai kamis pukul 07.00 WIB, senam pagi pada hari Jum’at pukul 05.30 WIB serta absensi dengan menggunakan *finger print*. Sedangkan pengawasan di lapangan dilakukan oleh kepala dinas secara tiba-tiba. Biasanya kepala Dinas Langsung datang ke kecamatan-kecamatan untuk melihat kinerja penyuluh dan kondisi masyarakat terutama petani di lapangan. selain kepala dinas kepala sub bidang juga melakukan monitoring dan evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2018). Dokumentasi apel pagi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai berikut:



Gambar 12. Apel Pagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
Sumber: Peneliti Sendiri

Selanjutnya pengawasan dalam terlaksananya pertanian terpadu juga dilaksanakan oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Pengawasan program pertanian terpadu dilihat dari ukuran keberhasilan program melalui lab terpadu, jumlah petani yang melakukan pertanian organik dan tingkat serangan hama penyakit. Pernyataan tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Rudi selaku Fungsional penyuluh bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam menopang ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian sampai barang setengah, yang diwujudkan dengan adanya budidaya pertanian terpadu. Pengawasan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilihat dari hasil ujin tanah dari lab terpadu setiap 6 bulan sekali, jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian organik dan tingkat serangan hama penyakit. Apabila serangan hama penyakit tinggi maka tidak ada keseimbangan ekosistem. Hal tersebut dikarenakan masih tinggi penggunaan pupuk kimia oleh masyarakat”. (Hasil wawancara 9 Januari 2018).

Fungsi Pengawasan dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan Daerah dan pertanian terpadu dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap enam bulan sekali, dilihat dari hasil uji tanah dari lab terpadu, jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian organik dan tingkat serangan hama penyakit. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Sukisno selaku Kepala Bagian Umum bahwa:

“Pengawasan budidaya pertanian terpadu dilakukan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang setiap satu bulan sekali setiap tanggal muda mengadakan monitoring dan evaluasi menyangkut kinerja pegawai guna mencapai pengembangan organisasi kedepannya. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pegawai melalui Kepala Bidang masing-masing departemen. Kepala Bidang bertugas untuk mengawasi anggotanya mengenai kinerja anggotanya. Selain itu Kepala dinas juga hampir setiap hari melakukan control dan pengawasan baik di kantor maupun ke lapangan mengontrol keadaan pertanian dan penyuluh lapangan. (Hasil wawancara 5 Februari 2018).

Fungsi pengawasan dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu selain dilakukan oleh kepala bidang yang bertanggungjawab kepada kepala dinas juga dilakukan oleh Bawasda atau Inspektorat guna meningkatkan kinerja pegawai dinas pertanian kabupaten jombang. sesuai dengan hasil wawancara Bapak Sukisno selaku Kepala Bagian Umum bahwa:

“Selain itu pengawasan juga dilakukan dari pemerintah daerah, kita disini sudah otoda jadi pengawasannya di pantau dan control dari pemda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemerintah Daerah (bawasda). Bawasda secara umum melakukan pengawasan dibidang penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup pelaksanaan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kinerja aparatur pemerintah kabupaten. Jadi kita Cuma mengikuti kalau ada inspetorat kalau mau ke lapangan dari dinas mempersiapkan”. (Hasil wawancara 5 Februari 2018).

Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilakukan oleh kepala bidang yang bertugas untuk menggerakkan para stafnya dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk tercapainya visi dan misi Dinas Pertanian kepala dinas melakukan pengawasan di dalam dan di luar organisasi sebagai upaya melihat kinerja para pegawai yang ada di lapangan. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Bawasda atau Inpektorat guna meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Sedangkan dalam upaya pengelolaan kethanan pangan dan pertanian terpadu pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilihat dari hasil ujin tanah dari lab terpadu setiap 6 bulan sekali, jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian organik dan tingkat serangan hama penyakit.

f. *Budgeting* (penganggaran)

Budgeting (penganggaran) merupakan rencana tertulis yang berkaitan dengan keuangan dalam menjalankan program ataupun kegiatan-kegiatan organisasi

sekarang dan akan datang. Anggaran Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2 (APBD Kabupaten). Pelaksanaan anggaran belanja digunakan untuk berbagai aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang dituju. Pembebanan biaya berperan dalam mengukur berbagai sumberdaya yang dipakai dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Dengan adanya perhitungan biaya maka Dinas Pertanian dapat melakukan pengeluaran atau pembelanjaan yang telah direncanakan oleh pejabat yang berwenang selaku pengguna anggaran belanja sehingga realisasi anggaran belanja dapat tercapai. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku Kepala Bidang Pelaporan dan Program menyatakan bahwa:

“Anggaran Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (APBD Kabupaten). Dinas pertanian tahun 2016 mengelola anggaran sejumlah 36.432.180.00 (tiga) puluh enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan. Dalam efisiensi anggaran Dinas Pertanian berupaya untuk mencapai target dan sasaran secara optimal dengan penggunaan anggaran seefisien mungkin yang dilakukan dengan perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang diperoleh”. (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2018).

Penganggaran dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu dijelaskan oleh Bapak Rudi Fungsional Penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang bahwa:

“laporan kegiatan dan anggaran atas pelaksanaan pertanian terpadu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dijabarkan secara sporadis di masing-masing kepala seksi bidang.hal tersebutb karena anggaran pertanian terpadu direncanakan oleh masing-masing sub bidang untuk mensupport kebutuhan dan kegiatan dalam pelaksanaan pertanian terpadu. Jadi laporan anggaran pertanian terpadu dilaporkan berdasarkan upaya atau bantuan yang dikeluarkan dari masing-masing sub bidang”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2017).

Pengelolaan anggaran dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu Dinas Pertanian wajib menyusun rencana atas anggaran belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian dituangkan dalam rencana tahunan. Anggaran belanja yang telah ditetapkan semula dapat mengalami perubahan dalam realisasinya, perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran atau pembelanjaan program atau kegiatan yang bersangkutan. Jika perubahan anggaran dilakukan dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan anggaran termasuk didalamnya pergeseran atau perubahan rincian anggaran. Ibu Endah selaku Kepala Bidang Pelaporan dan Program menyatakan bahwa:

“Untuk merealisasi anggaran agar sesuai dengan target yang ditentukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diharapkan dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan dapat bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target)”. (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2018).



Gambar 13. Dokumentasi saat peneliti berdiskusi dan melakukan wawancara terkait Budgeting di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Sumber: Peneliti Sendiri

Fungsi budgeting (penganggaran) dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu adalah untuk merencanakan kegiatan atau program-program yang berhubungan dengan keuangan. Anggaran dinas pertanian berasal dari APBD 2 atau APBD Kabupaten yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk diberikan kepada masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai pelayanan masyarakat dalam hal pertanian berusaha untuk merealisasi anggaran agar sesuai dengan target yang ditentukan, oleh karena itu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diharapkan dapat memacu kinerja seluruh pegawai dan dapat bertanggung jawabkan sesuai dengan tingkat capaian (target) yang diperoleh.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu

a. Faktor Pendukung

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tersedianya bahan kebutuhan pokok. Dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu dapat berjalan apabila adanya petani pengelola. Petani pengelola adalah masyarakat yang melakukan usaha di bidang pertanian meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan. Petani sebagai pengelola

usaha tani memerlukan sarana prasarana berupa tersedianya lahan pertanian. Kepemilikan lahan pertanian menjadi faktor pendukung program pertanian terpadu, karena lahan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan produksi pertanian. Dalam melaksanakan produksi pertanian masyarakat bisa memanfaatkan lahan seperti lahan sawah, lahan pekarangan dan hutan. Selain kepemilikan lahan dalam pelaksanaan budidaya pertanian terpadu juga harus juga harus mengetahui siapa saja yang menjadi peternak.

Status pemilik ternak menjadi faktor pendukung pertanian terpadu karena petani dan peternak dapat bekerja sama dalam pengelolaan budidaya masing-masing. Apabila petani tidak memiliki hewan ternak, petani bisa mencari limbah ternak yang ada di sekitarnya untuk proses pemupukan, sedangkan peternak nantinya juga bisa memanfaatkan limbah tanaman sebagai pakan ternak. Integrasi tanaman dan ternak berperan sebagai tenaga kerja dalam pengolahan tanah, memanfaatkan limbah ternak untuk menjaga kesuburan tanah dan menjadikan lapangan pekerjaan saat petani menunggu panen. Faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan program pertanian terpadu adalah tingkat teknologi. Teknologi baru yang diterapkan dalambidang pertanian selalu dimaksudkan untuk menaikkan produktivitas hasil pertanian. Selain itu petugas penyuluh lapangan yang handal juga menjadi faktor pendukung terlaksananya program pertanian terpadu. Petugas penyuluh lapangan sebagai pendamping dan pengawas program pertanian terpadu harus mampu menguasai seluruh teknologi di bidang pertanian. dari mulai proses penanaman sampai dengan pengelolaan hasil panen menjadi produk setengah jadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anasrul Hakim sebagai Koordinator Penyuluh

di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jogoroto menyatakan bahwa:menyatakan bahwa:

“Pendukung pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu ini di dukung dengan adanya lahan untuk melakukan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan. Serta teknologi tepat guna yang diharapkan dapat mempermudah para petani dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam melaksanakan program ini seharusnya ada kebijakan langsung dari pemerintah daerah. Akan tetapi selama ini masih di dukung dari bappeda saja”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018).

Faktor pendukung dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Rudi selaku fungsional penyuluh menyatakan bahwa:

“Pertanian terpadu dapat berjalan dengan adanya petani pengelola.petani pengelola merupakan petani yang memiliki usaha dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena jika tidak ada petani pengelola makasiapa yang akan menjalankan pertanian ini. Faktor pendukung yang ke dua yaitu adanya kepemilikan lahan, karena lahan merupakan tempat untuk produksi pertanian baik lahan untuk tanaman, peternakan dan perikanan. Faktor pendukung yang ketiga yaitu status kepemilikan ternak. Petani dan peternak dapat bekerja sama untuk meningkatkan hasil produksi masing-masing. Dalam pertanian terpadu limbah tanaman dapat menjadi input peternakan, begitupun juga limbah peternakan dapat menjadi input tanaman pertanian. selain itu teknologi baru juga dapat mendukung terlaksananya pertanian, karena dengan adanya teknologi yang canggih akan lebih memudahkan petani dalam melakukan pekerjaan pertanian. seperti adanya mesin penanam yang dapat membantu para petani untuk melakukan penanaman, dengan adanya mesin penanam petani sudah tidak lagi membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan penanaman. Semua ituterjadi juga tidak lepas dari penyuluh yang ada di lapangan.penyuluh sangat berperan penting dalam pendampingan dan pengawasan kondisi petani yang ada di lapangan.” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018).

b. Faktor Penghambat

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu, selain ada faktor pendukung juga ada faktor

penghambat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan program pertanian terpadu. Sampai saat ini masyarakat petani masih bergantung pada penggunaan pupuk kimia, terutama petani yang memiliki lahan pertanian sempit. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Suanto Sebagai salah satu Tokoh masyarakat di Kecamatan Jogoroto menyatakan bahwa:

“Sudah mengerti mengenai pertanian terpadu dengan memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk pertanian dan jerami atau rendheng supaya tidak dibakar akan tetapi digunakan sebagai pakan ternak atau bisa dibiarkan di sawah. Akan tetapi itu prosesnya lama. Sedangkan para petani tidak sabar mengenai hal itu. Apalagi petani yang mempunyai lahan tidak luas dan hanya mengandalkan hasil pertanian, jelas mereka tidak ingin hasil panennya menurun. Makanya sampai saat ini masih banyak petani yang menggunakan pupuk kimia untuk budidaya pertaniannya”. (Hasil wawancara 28 Januari 2018).

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pertanian terpadu selanjutnya adalah hambatan administratif dan kelembagaan. zx dan kelembagaan menjadi faktor penghambat pelaksanaan pertanian terpadu karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi atau mendorong terjadinya sinergitas. Sesuai dengan pendapat Bapak Anasrul Hakim sebagai Koordinator Penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jogoroto menyatakan bahwa:

“Sudah kita koordinasikan tapi masih nol, kalau menyampaikan tidak ada dukungan salah karena kita sudah menerima dukungan pendanaan tapi balik lagi diakhir akhir kita diarahkan ke pertanian lagi seperti pendopo, kita berharap ada kandang dan ternak yang seharusnya dibatu dari perikanan dan peternakan, tapi selama ini masih dapat dari Dinas Pertanian. Sinergitas masing-masing dinas sudah ada koordinasi tapi masih nol hanya sebatas dukungan tidak berupa tindakan/bukti. Padahal sudah ada dasar hukum pelaksanaan dan sudah diberi wadah rekening khusus pemberdayaan balai penyuluh pertanian dari BAPPEDA”. (Hasil wawancara tanggal 12 Januari 2018).

Bapak Rendy sebagai Koordinator Penyuluh dari Dinas Perikanan lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari masing2 dinas adalah sama-sama mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi bupati yaitu kesejahteraan masyarakat di masing2 bidang. Sejauh ini masih belum ada instruksi bupati yang memang menghendaki bahwa ada kegiatan yang sifatnya digagas secara bersama untuk dijadikan kawasan terpadu”. (hasil wawancara tanggal 18 Januari 2018).

C. Analisis Data

2. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah dan Pertanian Terpadu dilihat dari strategi fungsional manajemen dimana fungsi utamanya mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu:

a) *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) merupakan proses penentuan kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mempunyai tujuan mewujudkan petani sejahtera melalui budidaya pertanian terpadu. Budidaya pertanian terpadu dilaksanakan dengan tiga program unggulan yaitu meningkatkan kesuburan tanah, peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan dan peningkatan dinamika penyuluhan dan kelompok tani.. Sesuai dengan teori dan observasi yang ada di lapangan tujuan tersebut diharapkan dapat mengubah *mindset* para petani di Kabupaten Jombang agar tidak terus menerus bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Perencanaan program pertanian terpadu dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang dibantu para stafnya dengan melibatkan seluruh sub bidang

terkait dalam rangka menyuport keberhasilan upaya dan program yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam rangka pencapaian suatu tujuan, berusaha untuk melakukan pembekalan kepada para aparatur mengenai pelaksanaan program pertanian terpadu supaya dapat diimplementasikan oleh para petani yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu Dinas Pertanian juga meminta pendampingan dan pengawasan kepada para ahli dibidang pertanian. Pendampingan dan pengawasan dilakukan oleh petugas Fungsional Penyuluh Dinas Pertanian yang ditempatkan di setiap kecamatan yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang. Petugas penyuluh Dinas Pertanian berjumlah 81 orang, sedangkan kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang berjumlah 21 kecamatan. Dalam pelaksanaannya masing-masing kecamatan terdiri dari tiga sampai empat penyuluh sesuai dengan luas wilayah kecamatan yang ada. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dinas pertanian yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi balai penyuluh pertanian (BPP) sebagai basis peningkatan kualitas dan ketrampilan penyuluh dan petani.

Peningkatan kualitas dan ketrampiloan penyuluh dan petani dapat diwujudkan dengan adanya pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan dan pelatihan pertanian, pemeliharaan kesehatan tanaman dan hewan, konsultasi teknologi pertanian, layanan perizinan usaha tani dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan pangan terutama dalam pelaksanaan program pertanian terpadu.

Berdasarkan hasil kajian teori dan observasi di lapangan dalam proses perencanaan Dinas Pertanian sudah mengacu pada empat elemen yaitu adanya suatu tujuan untuk mewujudkan petani sejahtera melalui pertanian berkelanjutan yang diwujudkan dengan adanya program budidaya pertanian terpadu dalam mengatasi ketahanan pangan daerah. Program budidaya pertanian terpadu diwujudkan dengan adanya aksi tiga program unggulan yaitu meningkatkan kesuburan tanah, peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan dan peningkatan dinamika penyuluhan dan kelompok tani. Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Pertanian melibatkan seluruh sumber daya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terutama sumber daya aparatur yang berkedudukan sebagai Penyuluh Fungsional yang ada di setiap kecamatan. Penyuluh fungsional bertugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keadaan para petani yang diimplementasikan dengan adanya pelayanan jasa sebagai sumber informasi para petani.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Upaya peengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang selanjutnya adalah *Organizing* (pengorganisasian) merupakan proses penentuan, pembentukan dan pengaturan tugas atau pekerjaan suatu organisasi. Apabila tahap perencanaan sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Dalam

pengorganisasian ditentukan tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Setelah menyusun tenaga-tenaga yang dibutuhkan, kita harus mengorganisasikannya supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi pengorganisasian berarti melengkapi program-program yang sudah di susun dengan susunan organisasi, sehingga pelaksanaannya bisa dicapai dengan maksimal.

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah organisasi berupa lembaga atau unit kerja yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian. Dinas pertanian Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

Kepala Dinas Pertanian dalam mengorganisasikan suatu lembaga harus mengetahui dengan baik kemampuan para pegawainya, sehingga dapat menempatkan pegawai sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang mereka miliki. Kepala Dinas juga harus mengetahui tugas yang sedang dikerjakan oleh perorangan agar tidak terjadi pembebanan tugas yang berlebihan kepada para staf. Pembebanan tugas yang berlebihan atau tumpang tindih tugas akan mengakibatkan stress kerja baik fisik maupun psikis sehingga hasil kinerja tidak akan terlaksana secara optimal. Menurut Hasibuan (2014:127) langkah-langkah pengorganisasian meliputi:

- 1) Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- 2) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Mengelompokkan kegiatan-kegiatan, artinya, manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.
- 4) Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan di delegasikan kepada setiap departemen.
- 5) Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan padasetiap departemen.
- 6) Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindari.
- 7) Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang dipakai, apakah line organization, line and staff organization ataukah function organization.
- 8) Struktur, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan dalam organisasi.

Delapan langkah pengorganisasian tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepala dinas pertanian dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan kajian teori dan observasi yang ada dilapangan ada salah satu langkah yang mengganjal yaitu peranan perorangan. Pernan perorangan merupakan langkah dimana manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu, supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas. Langkah peranan perorangan sudah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian, akan tetapi masih tetap terjadi tumpang tindih tugas. Tumpang tindih tugas terjadi dikarenakan ada beberapa karyawan yang sudah mengalami pensiun jabatan. Tugas dan tanggung jawab karyawan yang sudah pensiun menyebabkan individu lain harus mengerjakannya, terutama individu satu departemen.

Tumpang tindih tugas terjadi karena Kepala Dinas Pertanian tidak memiliki kewenangan dalam mengisi jabatan yang kosong di beberapa departemen Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Pengisian jabatan dapat dilakukan jika adanya

perekrutan dari daerah, penetapannya pun berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena adanya Otonomi Daerah, sehingga pengisian jabatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

Pegorganisasian dalam pertanian terpadu dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama seluruh Dinas terkait dalam pengelolaan ketahanan pangan di Kabupaten Jombang. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang bertugas dari proses penanaman sampai menjadi barang setengah jadi sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Dalam optimalisasi program pertanian terpadu Dinas Pertanian juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dinas dalam menjalankan programnya

Dinas peternakan bertugas untuk memberikan arahan dan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas peternakan berupa hewan ternak, kesehatan hewan dan izin usaha ternak. Dalam rangka menompang ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu Dinas Peternakan memberikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing komunitas kelompok peternakan seperti: pemeriksaan gangguan produksi pada hewan, bantuan vitamin dan obat, perlakuan IB

(Inseminasi Buatan) pada hewan, dan bantuan perizinan usaha peternakan. Bantuan dari Dinas Peternakan Langsung diberikan kepada masyarakat melalui kelompok peternakan yang terdapat pada suatu daerah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu salah satunya dengan mengajukan proposal ke Dinas Peternakan.

Sejalan dengan pendapat diatas peran Dinas Perikanan dalam ketahanan pangan di Kabupaten Jombang yaitu dengan meningkatkan gizi protein masyarakat melalui produksi dengan cara menjaga produksi ikan serta berusaha meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan, memantau harga produksi ikan, serta berusaha untuk mengubah *mindsite* masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jombang mengutamakan sasarannya pada anak-anak. Anak-anak dianggap masih membutuhkan banyak asupan gizi dengan cara mengenalkan mereka dengan produk olahan ikan seperti bakso ikan, krupuk ikan, sosis ikan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil kajian teori dan observasi dilapangan dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sudah mengacu pada delapan langkah yang sudah disebutkan. Akan tetapi ada satu langkah yang belum terealisasikan secara maksimal yaitu peranan perorangan. Pernan perorangan merupakan langkah dimana manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu, supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas. Langkah peranan perorangan sudah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian, akan tetapi masih tetap terjadi tumpang tindih tugas karena adanya pensiun jabatan oleh beberapa karyawan. Dalam pengisian jabatan yang kosong

Kepala Dinas Pertanian tidak memiliki wewenang untuk mengisi jabatan tersebut sebelum ada penetapan pegawai dari Pemerintah Daerah.

Permasalahan diatas terjadi karena Kepala Dinas Pertanian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu Dinas Pertanian melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jombang. Masing-masing Dinas menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dilakukan Dinas Pertanian agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

c) *Staffing* (kepegawaian)

Staffing (kepegawaian) merupakan kegiatan penyusunan personalia dari proses perekrutan, sampai dengan usaha agar setiap sumber daya memberikan hasil yang maksimal kepada suatu organisasi. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 114 personil PNS yang terdiri dari 33 orang anggota fungsional umum dan 81 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jombang juga didukung oleh 64 Orang Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Fungsi *staffing* dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan dan pertanian terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sangat erat dengan fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat dijalankan dengan adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam menggerakkan suatu organisasi. Untuk menggerakkan suatu organisasi dengan

baik, maka perlu mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Menurut Sucahyowati (2017:7) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam *staffing* adalah sebagai berikut:

1. Menyeleksi (rekrutmen)

Rekrutmen merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai organisasi. Proses rekrutmen pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dinas pertanian berkedudukan dibawah pemerintah daerah, sehingga dalam pengisian jabatan di Dinas Pertanian merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang juga di dukung oleh 64 orang tenaga kontrak atau disebut sebagai Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang tugaskan langsung dari (Kementrian). Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) harus memiliki dasar tentang pertanian, karena mereka ditugaskan sebagai pembantu penyuluh pertanian. Penyuluh bertugas memberi penyuluhan perihal pertanian, oleh karena itu harus memiliki dasar atau latar belakang di bidang pertanian untuk bisa diterapkan di lapangan.

2. Memberi orientasi

Memberi orientasi adalah penyediaan informasi dasar dalam upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi pegawai di suatu organisasi. Pelatihan dan pengembangan awal pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan hasil observasi yang ada di lapangan dalam pemberian orientasi pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah biasa disebut dengan diklat dasar pegawai. Pelaksanaan diklat dasar pegawai biasanya dilaksanakan kurang lebih enam bulan setelah adanya Surat Keputusan (SK). Latihan dasar bertujuan untuk membentuk pegawai yang profesional yang dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin pegawai serta menguasai kompetensi teknis bidang tugas serta profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan

Mengadakan pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan *skill* atau kemampuan yang dibutuhkan pegawai lama ataupun baru untuk melakukan pekerjaan. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan pegawai. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas Pertanian antara lain seperti outbound training sebagai bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka, adanya seminar motivasi kinerja dengan mendatangkan motivator sebagai narasumber, Adanya permintaan perwakilan beberapa pegawai untuk pendidikan dan pelatihan di balai pembimbingan nganjuk karena sebagai wujud kerja sama

Upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan melakukan fungsi

staffing didukung oleh 114 personil PNS yang terdiri dari 33 orang anggota fungsional umum dan 81 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jombang juga didukung oleh 64 Orang Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Proses penyeleksian pegawai dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pengembangan potensi pegawai Dinas Pertanian melakukan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh internal dan eksternal organisasi dengan tujuan para pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

d) *Actuating* (penggerak)

Actuating merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara menggerakkan anggota organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu fungsi *actuating* dilaksanakan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melaksanakan fungsi *actuating* bekerja sama dengan para pegawai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi demi mencapai visi dan misi organisasi. Kepala Dinas memberikan pengarahan dan motivasi kepada para pegawai supaya para pegawai terdorong dan semangat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengarahan dan motivasi diberikan oleh Kepala Dinas kepada masing-masing kepala sub bidang. Selanjutnya kepala sub bidang memberi pengarahan kepada para

anggotanya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Pengarahan juga diberikan oleh Kepala Dinas secara langsung kepada para pegawai saat melakukan apel pagi. Apel pagi dinas pertanian kabupaten jombang dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis pukul 07.00 WIB. Apel pagi yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam rangka membangun dan melatih disiplin para pegawai terhadap jam kerja yang telah ditentukan serta sebagai media *sharing* informasi kepada pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Salah satu tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah meningkatkan produksi melalui inovasi teknologi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sebagai organisasi pemerintah yang bergerak di bidang pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melaksanakan manajemen pemerintahan Negara dengan pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu. Fungsi *actuating* dalam upaya ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan tiga program unggulan yaitu:

1. Peningkatan Kesuburan Tanah

Peningkatan kesuburan tanah dilakukan melalui pertanian berkelanjutan yang diwujudkan dengan program-program kegiatan pertanian yang berorientasi pada kesuburan tanah salah satunya dengan melakukan pertanian organik. Dalam meningkatkan kesuburan tanah melalui pertanian organik para petani dilatih untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam proses pertaniannya yaitu dengan mengganti pupuk kimia dengan memanfaatkan limbah kandang sebagai pupuk dan

pengairan. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan bahan organik yaitu sebagai berikut:

a) Pengembalian sisa panen

Pengembalian sisa panen dari komoditas yang telah ditanam dapat mengembalikan kesuburan tanah. Dengan mengembalikan sisa panen maka kebutuhan tanah akan input pupuk akan semakin berkurang. Setelah panen sisa komoditas tanaman seperti jerami pada umumnya seringkali di bakar oleh para petani dan mengakhibatkan unsur hara dalam tanah semakin lama semakin berkurang. Pengembalian sisa panen dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah yaitu dengan tidak membakar limbah panen seperti jerami dan sisa-sisa panen lainnya. Limbah panen lebih baik diolah menjadi kompos dan dikembalikan lagi ke tanah. kompos jerami ini secara bertahap akan dapat mengembalikan kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah dan lambat laun akan dapat mengembalikan kesuburan tanah. Meningkatnya kesuburan tanah maka kemungkinan besar juga akan meningkatkan produksi dan produktivitas hasil panen para petani di kabupaten Jombang. Hal tersebut sudah diterapkan oleh salah satu warga di Kabupaten Jombang, yaitu Bapak Makmur sebagai ketua kelompok Tani di Desa Tejo. Berikut ini berita keberhasilan Bapak Makmur:

TEMPO Interaktif, Jombang - Hadi Suryanto tampak *sumringah*. Semangatnya terus membungkah pada usianya yang memasuki 50 tahun. Senyum selalu menghiasi wajah ayah tiga anak dan kakek seorang cucu tersebut.

Hadi, salah seorang petani di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, itu tak henti-hentinya menghaturkan puji syukurnya kepada Tuhan. Panenan padi di lahannya yang tak seberapa luas, yakni 100 *ru*, atau setara 275 meter persegi kian meningkat. Ukuran tanah bagi petani di Jawa, 1 *ru* sama dengan 2,75 meter. "Hasil panen kali ini mencapai sembilan kuintal lebih, hampir satu ton," ujarnya seraya menunjukkan tumpukan padi di dapur rumahnya di RT 01 RW 01 Desa Tejo.

Hadi menuturkan, hasil panen sawah warisan orang tuanya selama lima tahun terakhir terus menurun. Pada musim panen tahun lalu, sawahnya hanya menghasilkan lima kuintal. Padahal, berbagai jenis pupuk kimia sudah dia taburkan.

Hadi tak ingin patah semangat. Apalagi ia tak punya pekerjaan lain. Sejak kecil sudah bekerja di sawah sebagai petani sebagaimana umumnya warga Desa Tejo lainnya.

Kerja keras harus dilakoninya sembari terus putar otak agar tingkat kesuburan tanahnya bisa diperbaiki. Terbersit pikiran membiarkan sawahnya menganggur selama satu musim panen. Batang jagung setelah panen tahun sebelumnya dibiarkan, padahal biasanya dibakar untuk menyongsong musim tanam padi.

Selama lahan sawahnya tak ditanami apapun, Hadi menabur 250 kilogram pupuk organik. Ia berharap dengan menabur pupuk organik pada lahan yang masih dipenuhi batang jagung yang mengering, tingkat kesuburan tanah miliknya kembali meningkat. "Dahulu ketika orang tua masih hidup, cukup diberi sedikit pupuk kimia, tanaman langsung subur. Tapi belakangan, meski pupuk kimia ditingkatkan, hasil panen malah menurun," ucapnya.

Hasil kerja Hadi ternyata tak sia-sia. Sawahnya yang sempat menganggur, setelah kembali ditanami pada musim tanam lalu, memberikan hasil yang baginya sudah sangat memuaskan. Tingkat kesuburan tanahnya kembali normal. Jumlah panen sembilan kuintal gabah kering giling sudah mendekati hasil puncak yang pernah dinikmati semasa orang tuanya masih hidup. "Hasil panen tertinggi pernah mencapai satu ton," tuturnya mengenang masa lalu.

Gambar 14. Berita keberhasilan penggunaan limbah tanaman dalam meningkatkan kesuburan tanah

Sumber: <https://tekno.tempo.co/read/358711/begini-cara-petani-jombang-akali-sawah-agar-panen-melimpah> (4 Maret 2018)

b) Pemberian kotoran hewan

Kotoran hewan atau Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, kerbau dan burung. Kotoran hewan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan cara dikomposkan terlebih dahulu atau di aplikasikan langsung ke lahan. Keuntungan utama penggunaan pupuk kandang selain sebagai sumber hara tanaman adalah dapat memperbaiki kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk bagi tanaman dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena pupuk kandang tidak dibuang sembrang tempat melainkan dimanfaatkan kembali kegunaannya. Pemberdayaan masyarakat dalam

penggunaan pupuk kandang dapat dilakukan melalui mendorong para petani dalam mengkomposkan pupuk kandang dan mendorong petani melakukan penganekaragaman usaha pertanian berbasis ternak.

c) Pemberian pupuk hijau

Pupuk hijau berasal dari sisa-sisa tanaman (sisa panen) atau tanaman yang ditanam secara khusus sebagai penghasil pupuk hijau atau yang berasal dari tanaman liat yaitu tanaman yang ada di area pinggir lahan, jalan atau saluran irigasi. Penggunaan pupuk secara seimbang akan meningkatkan produksi tanaman. Peningkatan produksi juga meningkatkan jumlah sisa-sisa tanaman seperti daun, akar, batang yang tertinggal atau yang dapat dikembalikan ke dalam tanah akan dapat memperkaya cadangan unsur hara, sehingga mengurangi kebutuhan hara yang harus ditambahkan oleh tanah. Apabila hal ini dilakukan secara terus menerus akan mencapai kondisi hara yang cukup untuk pertumbuhan dan produksi tanaman tanpa ada masukan pupuk dari luar.

Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan dinas pertanian untuk pengelolaan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu yang diwujudkan dengan kegiatan meningkatkan kesuburan tanah. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian seperti traktor, alat pemanen, alat tanam, granuator (alat membuat pupuk kompos), bantuan bibit dan penyuluh sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan pertanian. Hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan prima. Pelayanan prima dalam konteks publik berarti setiap kegiatan perihal melayani, servis atau jasa

dengan standar dan ciri khas yang sangat baik untuk memuaskan masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tujuan pelayanan prima adalah memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada konsumennya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berusaha untuk selalu memberikan rasa puas dan percaya kepada masyarakat akan kinerja pemerintah.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian Melalui Optimalisasi Lahan.

Optimalisasi lahan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Kegiatan optimasi lahan pertanian dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam rangka menopang ketahanan pangan melalui kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan untuk memenuhi kriteria lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan dari aspek teknis bentang lahan, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta peningkatan infrastruktur usaha tani yang diperlukan guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Tingkat produksi merupakan penentu utama ketahanan pangan baik regional maupun nasional. Sawit dan Ariani (1997) mengemukakan bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Dalam meningkatkan produksi

dan produktivitas hasil pertanian melalui optimalisasi lahan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melakukan dua cara yaitu:

a) Intensifikasi lahan pertanian

Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memanfaatkan lahan yang sudah ada. Adapun langkah-langkah intensifikasi pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah: pengairan secara teratur, penggunaan bibit yang unggul, pemupukan secara teratur sampai menyerap ke bagian akar, pemberantasan hama penyakit pada tanaman, pengolahan setelah panen, perlindungan lahan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

b) Ekstensifikasi lahan pertanian

Eksstensifikasi pertanian usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mencari lahan-lahan baru pertanian baru yang bisa ditanami tanaman dan menghasilkan nilai tambah dari hasil panen tersebut dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti memanfaatkan hutan, rawa-rawan dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melakukan ekstensifikasi lahan pertanian antara lain: Pemanfaatan lahan pekarangan dan Melakukan kerjasama dengan perhutani. Kerja sama yang dilakukan Dinas Pertanian dengan perhutani adalah untuk memanfaatkan fungsi hutan dengan melibatkan kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di daerah hutan Kabupaten Jombang seperti Wonosalam, Kabuh, Plandaan, Bareng). Hutan yang sudah ditanami jati, pinus disisipi dengan tanaman lain seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan lain-lain.

3. Peningkatan Dinamika Penyuluhan dan Kelompok Tani

Sektor pertanian mempunyai peranan yang upayas terutama sebagai penyedia pangan masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan pelaku utama yang professional dan mampu dalam membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani penyuluh pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya. Sedangkan penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar poktan dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Poktan adalah perkumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kepentingan, kondisi social dan ekonomi yang sama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian melakukan beberapa kegiatan diantaranya: Gerakan pembentukan limbah organik, Gerakan penggunaan MOL dan Bokashi, Gerakan pengembangan agens hayati, Gerakan penerapan teknologi

tepat guna. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pegawai Dinas Pertanian melibatkan beberapa aktor seperti: Petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan/poktan), Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA/GHIPPA), Penyuluh Swadaya, Kios Pupuk/Distributor, Lembaga Permodalan, Praktisi Pertanian.

Fungsi *actuating* dilaksanakan Dinas Pertanian dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu guna mewujudkan kebutuhan bahan pangan akan masyarakat. Kebutuhan bahan pangan meliputi beras, jagung, minyak, telur, susu, sayur-sayuran dan buah-buahan. Aktor yang terlibat dalam fungsi *actuating* antara lain Petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan/poktan), Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA/GHIPPA), Penyuluh Swadaya, Kios Pupuk/Distributor, Lembaga Permodalan, Praktisi Pertanian. Dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berusaha untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam aspek pemberian bantuan. pemberian bantuan oleh pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai penerima bantuan.

e) *Controlling* (pengawasan)

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah *Controlling* (pengawasan). *Controlling* (pengawasan) merupakan proses memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan hasil dengan membandingkan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya suatu

penyimpangan dan menyusun *feedback* untuk perbaikan organisasi dimasa yang akan datang. Pengawasan dapat dilaksanakan pada proses perencanaan, pengorganisasian, personalia, pelaksanaan dan penganggaran. Pengawasan dimulai sejak proses perencanaan hingga pada tahap akhir kegiatan dan pencapaian tujuan. Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Kepala Bidang, Kepala Dinas, pemerintah daerah dan inspektorat.

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bidang dalam rangka mengontrol dan memberi arahan kepada anggotanya mengenai kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang. Pengawasan juga dilakukan oleh Kepala Dinas hampir setiap hari melakukan control baik di kantor maupun dilapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas di kantor meliputi disiplin pegawai dengan mengikuti apel pagi pada hari Senin sampai Kamis pukul 07.00 WIB dan senam pagi pada Hari Jum'at pukul 05.30 WIB, serta absensi melalui finger print. Selain itu pegawai juga melakukan control dengan mengunjungi setiap ruangan untuk melihat kondisi para pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pengawasan lapangan dilakukan oleh kepala dinas secara tidak terjadwal. kepala dinas langsung melakukan control ke lapangan untuk melihat kondisi penyuluh lapangan dan masyarakat petani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam rangka memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi mengadakan rapat bulanan. Rapat bulanan merupakan rapat yang dilakukan setiap satu bulan sekali dengan diikuti seluruh pegawai dalam rangka perbaikan organisasi kedepannya. Pengawasan juga dilakukan dari

Pemerintah Daerah melalui Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencakup pelaksanaan terhadap peraturan pemerintah daerah dan kinerja aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Pengawasan ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertanian serta implementasi kegiatan yang ada di Lapangan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu dilihat dari hasil uji tanah dari lab terpadu untuk setiap 6 bulan sekali, jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian organik dan tingkat serangan hama penyakit. Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang mengontrol dan memberi arahan kepada anggotanya mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya Kepala Dinas hampir setiap hari melakukan control dan pengawasan secara langsung kepada seluruh staf yang ada di kantor ataupun di lapangan. Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat di implementasikan sesuai dengan sasaran diadakan rapat bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat memperbaiki keadaan organisasi kedepannya. Pengawasan juga dilakukan oleh bawasda atau inspektorat mengenai pelaksanaan terhadap peraturan pemerintah daerah dan kinerja aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

f) *Budgeting* (penganggaran)

Upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian lainnya adalah *Budgeting* (penganggaran), merupakan rencana tertulis yang berkaitan dengan keuangan dalam menjalankan program ataupun kegiatan-kegiatan organisasi sekarang dan akan datang. Teori *budgeting* menjelaskan adanya unsur penganggaran yaitu rencana, meliputi seluruh kegiatan organisasi dan dinyatakan dalam moneter. Begitu pula Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, untuk menghindari penyelewengan anggaran dilakukan suatu rencana dengan jumlah anggaran dalam satu tahun kebutuhan organisasi, karena semua anggaran harus direncanakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Anggaran Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berasal dari APBD 2 (APBD Kabupaten). Dinas pertanian tahun 2016 mengelola anggaran sejumlah 36.432.180.00 (tiga) puluh enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan anggaran belanja digunakan untuk berbagai aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang dituju. Pembebanan biaya berperan dalam mengukur berbagai sumberdaya yang dipakai dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Dengan adanya perhitungan biaya maka Dinas Pertanian dapat melakukan pengeluaran atau pembelanjaan yang telah direncanakan oleh pejabat yang berwenang selaku pengguna anggaran belanja sehingga realisasi anggaran belanja dapat tercapai. Dalam efisiensi anggaran Dinas Pertanian berupaya untuk mencapai target dan sasaran secara optimal dengan penggunaan anggaran seefisien mungkin

yang dilakukan dengan perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang diperoleh. Selain itu untuk untuk merealisasi anggaran agar sesuai dengan target yang ditentukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyusun Laporan Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diharapkan dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan dapat bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan kajian teori dan hasil observasi di lapangan, dalam menjalankan fungsi *actuating* Dinas Pertanian wajib menyusun rencana atas anggaran belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian dituangkan dalam rencana tahunan. Anggaran belanja yang telah ditetapkan semula dapat mengalami perubahan dalam realisasinya, perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran atau pembelanjaan program atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk merealisasikan anggaran agar sesuai dengan target Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyusun Laporan Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai pelayanan publik di bidang pertanian LAKIP sebagai bentuk laporan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang dimuat dalam *website* Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan pelayanan publik penggunaan anggaran digunakan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, seperti dalam pemberian bantuan alat pertanian, bibit, dan modal yang diberikan kepada kelompok tani di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Jombang. Dalam pemberian bantuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas

Pertanian langsung diserahkan kepada masyarakat melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah.

2. Faktor pendukung dan penghambat upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung dengan adanya petani pengelola. Petani pengelola adalah masyarakat yang melakukan usaha di bidang pertanian meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan. Petani sebagai pengelola usaha tani memerlukan sarana prasarana berupa tersedianya lahan pertanian. Kepemilikan lahan pertanian menjadi faktor pendukung pertanian terpadu, karena lahan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan produksi pertanian. Dalam melaksanakan produksi pertanian masyarakat bisa memanfaatkan lahan seperti lahan sawah, lahan pekarangan dan hutan. Selain kepemilikan lahan dalam pelaksanaan budidaya pertanian terpadu juga harus mengetahui siapa saja yang menjadi peternak.

Status pemilik ternak menjadi faktor pendukung pertanian terpadu karena petani dan peternak dapat bekerja sama dalam pengelolaan budidayanya masing-masing. Apabila petani tidak memiliki hewan ternak, petani bisa mencari limbah ternak yang ada di sekitarnya untuk proses pemupukan, sedangkan peternak nantinya juga bisa memanfaatkan limbah tanaman sebagai pakan ternak. Integrasi tanaman dan ternak berperan sebagai tenaga kerja dalam pengolahan tanah,

memanfaatkan limbah ternak untuk menjaga kesuburan tanah dan menjadikan lapangan pekerjaan saat petani menunggu panen. Faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan program pertanian terpadu adalah tingkat teknologi. Teknologi baru yang diterapkan dalam bidang pertanian selalu dimaksudkan untuk menaikkan produktivitas hasil pertanian. Selain itu petugas penyuluh lapangan yang handal juga menjadi faktor pendukung terlaksananya pertanian terpadu. Petugas penyuluh lapangan sebagai pendamping dan pengawas program pertanian terpadu harus mampu menguasai seluruh teknologi di bidang pertanian, dari mulai proses penanaman sampai dengan pengelolaan hasil panen menjadi produk setengah jadi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan program pertanian terpadu. Pola pikir masyarakat yang kuat dalam melakukan bertani konvensional serta kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep dasar dan teknologi dalam melaksanakan pertanian terpadu. Padahal para penyuluh lapangan sudah memberikan sosialisasi mengenai pertanian terpadu kepada para petani. Akan tetapi sampai saat ini para petani masih bergantung pada penggunaan pupuk kimia terutama petani yang memiliki lahan pertanian sempit. Hal tersebut terjadi karena petani yang memiliki lahan sempit tidak ingin menerima resiko dengan menurunnya hasil pertanian. Proses awal pelaksanaan pertanian terpadu dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian akan mengalami penurunan. Seiring berjalannya waktu hasil produksi akan meningkat kembali bahkan bisa lebih meningkat.

Beberapa kendala terkait dengan penurunan hasil pada masa peralihan dari cara bertani konvensional menuju budaya pertanian organik menjadi salah satu alasan bagi petani enggan menerapkan pola pertanian organik dalam meningkatkan kesuburan tanah.

Selain itu ditemui pula kendala administratif dan kelembagaan. Perencanaan program pertanian terpadu tidak didukung dengan dokumen rencana upayas atau rencana operasional dalam melaksanakan pertanian terpadu di Kabupaten Jombang. Kelembagaan dan administratif menjadi faktor penghambat pelaksanaan pertanian terpadu karena tidak adanya kebijakan pemerintah daerah yang memfasilitasi atau mendorong terjadinya sinergitas. Selama ini hanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang melakukan dorongan dan memberikan informasi terhadap pelaksanaan pertanian terpadu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sudah memberikan wadah rekening khusus untuk pemberdayaan Balai Penyuluh Pertanian, supaya masing-masing Dinas dapat memberikan bantuan kepada BPP dalam terlaksananya program yang efektif dan efisien. Akan tetapi selama ini hanya masih sebatas koordinasi. Eksekusi kegiatan dari masing-masing Dinas sampai saat ini belum ada, untuk membantu sumber pendanaan dan pengelolaan program program pertanian terpadu. Masing-masing Dinas dalam memberikan bantuan diberikan langsung kepada masyarakat. Dinas Peternakan dan Perikanan dalam memberikan dukungan untuk program pertanian terpadu langsung diberikan kepada masyarakat. Dinas Peternakan memberikan bantuan kepada peternak dan Dinas perikanan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membudidayakan ikan. Mereka tidak bisa mendukung program

ini melalui BPP. Hal tersebut terjadi karena BPP bukan termasuk ke dalam tanggung jawab Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Oleh karena itu sumber pendanaan dan pengelolaan masing-masing Dinas terkait tidak bisa dilakukan karena tidak adanya dokumen dan kebijakan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan pertanian terpadu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu dilihat dari strategi fungsional manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:
 - a. Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Pertanian melibatkan seluruh sumber daya aparatur terutama yang berkedudukan sebagai Penyuluh Fungsional yang ada di setiap Kecamatan. Penyuluh fungsional bertugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keadaan para petani yang diimplementasikan dengan adanya pelayanan jasa sebagai sumber informasi para petani.
 - b. Pengorganisasian yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam strategi pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu. Dinas Pertanian mencoba untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jombang. Masing-masing Dinas menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dilakukan Dinas Pertanian agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.
 - c. *Staffing* (kepegawaian) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 114 personil PNS yang terdiri dari 33 orang anggota fungsional umum dan 81

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jombang juga didukung oleh 64 Orang Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Proses penyeleksian pegawai dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pengembangan potensi pegawai Dinas Pertanian melakukan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh internal dan eksternal organisasi dengan tujuan para pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

- d. Selanjutnya fungsi *actuating* (pelaksanaan) dilaksanakan Dinas Pertanian dalam strategi pengelolaan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu guna mewujudkan kebutuhan bahan pangan akan masyarakat. Aktor yang terlibat dalam program pertanian terpadu antara lain Petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan/poktan), Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA/GHIPPA), Penyuluh Swadaya, Kios Pupuk/Distributor, Lembaga Permodalan, Praktisi Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berusaha untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai pelayanan public.
- e. *Controlling* (Pengawasan) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam strategi pengelolaan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu dilihat dari hasil uji tanah dari lab terpadu untuk setiap 6 bulan sekali, jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian organik dan tingkat serangan hama penyakit hama tanaman. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memberi arahan dan informasi kepada para petani dalam melaksanakan usaha di bidang pertanian.

- f. *Budgeting* (penganggaran) dilakukan Dinas Pertanian dengan menyusun rencana atas anggaran belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian dituangkan dalam rencana tahunan. Untuk merealisasikan anggaran agar sesuai dengan target Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP sebagai bentuk laporan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang dimuat dalam *website* Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan pelayanan public penggunaan anggaran digunakan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, seperti dalam pemberian bantuan alat pertanian, bibit, dan modal yang diberikan kepada kelompok tani di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Jombang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu yaitu:
 - a. Faktor pendukung yang mempengaruhi upaya Dinas Pertanian dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu antara lain:
 - 1) Petani pengelola yaitu masyarakat yang melakukan usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.
 - 2) Adanya kepemilikan lahan
 - 3) Mengetahui status pemilik ternak
 - 4) Tingkat teknologi
 - 5) Petugas Penyuluh Lapangan yang handal

3. Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu antara lain:

- 1) Kendala administrasi dan kelembagaan
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat
- 3) Kepemilikan lahan relif sempit
- 4) Penurunan hasil pertanian

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas oleh peneliti, maka peneliti berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu. Masukan tersebut antara lain:

1. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam upaya pengelolaan ketahanan pangan daerah dan pertanian terpadu hendaknya menjadi perwakilan dari Dinas-dinas terkait kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan kerja sama antar instansi dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang memperjelas pelaksanaan budidaya pertanian terpadu. Karena jika tidak ada kebijakan atau peraturan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pertanian terpadu, maka Dinas-dinas lain menjadi sulit untuk memberikan sumber pendanaan dan pengelolaan sumber daya dalam pertanian terpadu terkait perbedaan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda atau bukan rumah tangganya.

2. Meningkatkan sosialisasi secara luas dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai manfaat budidaya pertanian terpadu, sosialisasi dapat dilakukan melalui Gapoktan yang ada di masing-masing desa supaya masyarakat dapat lebih mengerti dan faham mengenai manfaat pertanian terpadu dan dapat merubah *mindsite* terutama para petani dari bertani secara konvensional menjadi bertani secara organik. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan melalui televisi lokal Jombang seperti RCTV, melalui radio Dinas Pertanian, melalui *website* Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan membuat akun *instagram* Dinas Pertanian untuk *share* berbagai informasi dan gambaran mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.
3. Memberikan bantuan modal kepada perwakilan gapoktan atas kesepakatan bersama untuk digunakan sebagai percobaan budidaya pertanian terpadu. Setelah mencapai hasil yang maksimal modal tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Karena masyarakat lebih percaya apabila ada bukti di balik sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian.
4. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan kosong yang ada di lahan dengan tanaman tambahan seperti kacang, cabe, terong ataupun dengan beternak sehingga dapat menambah hasil produksi serta dapat meningkatkan usaha di bidang pertanian dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Gofur. 2012. *Manajemen Teknik Analisis Lingkungan Usaha*. Jakarta: PT Grafindo.
- Almanshur, F & Ghony, M.D. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi.
- Hasibuan. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, Sjamsiar Syamsuddini. 2010. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.
- Kuncoro Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publikation, Thirs Edition
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmayanty, Nina. 2013. *Manajemen pelayanan prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riko. 2015. *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

- Salam, Alfitra. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Non Profit*. Jakarta: PT. Gramedia Grasindo.
- Sinambela, Dkk. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA.
- Sucahyowati, Hari. 2017. *Sebuah Pengantar Manajemen*. Jakarta: Wilis.
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: nimas Multima.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Public*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Winarsih dan Ratminto. 2005. *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank. 2008. *Agriculture for Development*. World Development Report 2008. Washington DC.
- Badan Ketahanan Pangan. 2015. *Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2015-2019*. Jakarta: BKP
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2014*. Jombang: BPS.
- Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. 2017. *Rencana Strategis 2014-2018*. Jombang: Disperta.
- Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. 2016. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jombang: Disperta.

- _____ 2015. *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2015*. Jombang: BPS.
- _____ 2016. *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016*. Jombang: BPS.
- _____ 2017. *Kabupaten Jombang Dalam Angka 2017*. Jombang: BPS.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
- Pemerintah Kabupaten Jombang. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018*. Jombang:PEMDA.
- Hermanto 2007. *Reorientasi Kebijakan Pertanian Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Otonomi Daerah*. Vol 7 No, 4. 369-383, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 dari <http://ejurnal.Litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4271/3607>.
- Ilham, Nyak, dkk. 2006. *Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan*. *Jurnal Agroekonomi*, Vol 24 No. 2, h..157-177, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 dari <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/article/view/4730>
- Kholilulloh, M. Ibrahim. 2013. *Kapabilitas Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Program Pertanian Terpadu Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Vol.1, Nomor 1 diakses pada tanggal 30 September

2017 dari http://journal.unair.ac.id/download_fullpapers17%20IbrahimKMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf.

Harahap dkk. 2018. *Sikap Petani Terhadap Pilot Project Pertanian Terpadu*. Diakses 23 Februari 2018 dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184297&val=4143&title=SIKAP%20PETANI%20TERHADAP%20PILOT%20PROJECT%20PERTANIAN%20TERPADU%20%20%20%20\(Studi%20kasus%20:%20Desa%20Tangga%20Batu%20II,%20Kecamatan%20Parmaksian,%20Kabupaten%20Toba%20Samosir\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184297&val=4143&title=SIKAP%20PETANI%20TERHADAP%20PILOT%20PROJECT%20PERTANIAN%20TERPADU%20%20%20%20(Studi%20kasus%20:%20Desa%20Tangga%20Batu%20II,%20Kecamatan%20Parmaksian,%20Kabupaten%20Toba%20Samosir))

Ranchman dan Ariani. 2002. *Ketahanan pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi*. Vol.20, Nomor 1 diakses pada tanggal 23 Februari 2018 dari <https://media.neliti.com/media/publications/61337-ID-ketahanan-pangan-konsep-pengukuran-dan-s.pdf>.

CURICULUM VITAE

A. BIODATA PRIBADI

1. Nama : Rizki Nurin Nazilah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 5 Februari 1996
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi, Berat Badan : 167 cm, 47 kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : RT/RW. 005/002 Dsn. Dermo Ds. Mentaos
Kec. Gudo Kab. Jombang
9. No Hp : 085853827100
10. Email : rizkinurin4@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : RA Al-Asy'ari Keras 2000-2002
2. SD : SD Negeri Mentaos 2002-2008
3. SMP : SMP Darul Ulum 1 Peterongan Jombang
2008-2011
4. SMA : SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT
Peterongan
Jombang 2011-2014
5. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu
Administrasi, Jurusan Administrasi Publik,
Program Studi Ilmu Administrasi Publik S1
2014-2018



C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FORKIM) FIA
UB 2014
2. Karang Taruna Desa Mentaos 2008 sebagai Sekertaris

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Fokus	Pertanyaan	Informan
1.	<p>1. Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu, dilihat dari: Strategi fungsional manajemen, dengan fungsi utamanya mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu:</p> <p>a. Planning (perencanaan)</p> <p>b. Organizing (pengorganisasian)</p> <p>c. Actuating (penggerak)</p> <p>d. Controlling (pengawasan)</p> <p>e. Staffing (kepegawaian)</p> <p>f. Budgeting (penganggaran).</p>	<p>1) Apa yang dimaksud dengan program pertanian terpadu yang dijalankan oleh dinas pertanian Kabupaten Jombang? Tujuan?</p> <p>2) Apa saja ruang lingkup program pertanian terpadu?</p> <p>3) Apa program pertanian terpadu sudah dijalankan di seluruh kabupaten jombang? Daerah mana saja?</p> <p>a. Planning (perencanaan)</p> <p>1) Apakah ada perencanaan dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu? Perencanaan apa saja yang dibuat dalam program pertanian terpadu?</p> <p>2) Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program pertanian terpadu?</p> <p>3) Bagaimana penetapan indikator dalam pencapaian keberhasilan program pertanian terpadu terhadap ketahanan pangan daerah Kabupaten Jombang?</p> <p>b. Organizing (pengorganisasian)</p> <p>1) Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan, pembentukan dan pengaturan program pertanian terpadu?</p> <p>2) Bagaimana bentuk struktur program pertanian terpadu?</p> <p>3) Bagaimana tugas dan fungsi dinas pertanian dalam program pertanian terpadu?</p> <p>4) Apakah dalam memberikan tupoksi dinas pertanian sudah menempatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kemampuannya?</p>	<p>Koordinator Fungsional Penyuluh, Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian, Penyuluh Lapangan Dinas Peternakan, Penyuluh Lapangan perikanan, Kepala Sub Bagian Umum</p>

		<p>5) Bagaimana prosedur pelaksanaan program pertanian terpadu?</p> <p>6) Bagaimana strategi dinas pertanian dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui program pertanian terpadu?</p> <p>c. Actuating (penggerak)</p> <p>1) Siapa saja actor yang terlibat dalam pelaksanaan program pertanian terpadu?</p> <p>2) Bagaimana tindakan/ usaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu?</p> <p>3) Dalam hal ini bagaimana peran kepala dinas pertanian dalam menggerakkan anggotanya untuk pencapaian keberhasilan program pertanian terpadu?</p> <p>4) Bagaimana respon masyarakat mengenai program pertanian terpadu?</p> <p>d. Controlling (pengawasan)</p> <p>1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pertanian terpadu?(dari atasan, sesama pegawai/masyarakat?</p> <p>2) Apa saja alat yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan?</p> <p>3) Kapan pengawasan dilakukan?</p> <p>4) Bagaimana cara mengukur hasil keberhasilan program pertanian terpadu ?</p> <p>e. Staffing (kepegawaian)</p> <p>1) Bagaimana proses perekrutan pegawai dinas pertanian kabupaten jombang?</p> <p>2) Bagaimana cara mengembangkan sumber daya</p>	
--	--	---	--

		<p>manusia di dinas pertanian kabupaten jombang?</p> <p>3) Bagaimana pelaksanaan tugas dinas pertanian Kabupaten Jombang dalam strategi pengelolaan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu?</p> <p>f. Budgeting (penganggaran)</p> <p>1) Berapa besar anggaran yang diperlukan dalam menjalankan program pertanian terpadu? Untuk apa saja?</p> <p>2) Dari maa saja anggaran berasal?</p>	
2		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketahanan pangan yang terjadi di kabupaten jombang? 2. Bagaimana tugas pemerintah dalam menangani ketahanan pangan di Kabupaten Jombang? 3. Apa yang saudara ketahui tentang program pertanian terpadu? 4. Bagaimana dampak program pertanian terpadu kepada masyarakat? 5. Bagaimana kualitas sumber daya aparatur yang ada di dinas pertanian kabupaten jombang dalam melaksanakan program pertanian terpadu? 6. Bagaimana hasil panen saudara dari sebelum dan sesudah di terapkan program? 7. Bagaimana pengadaan alat dan mesin dalam pertanian menurut saudara dalam meningkatkan hasil produksi? 	Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	KET
	2 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya	43.000.000	
	3 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor	48.100.000	
	4 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional	54.323.125	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	APBD Kab
	1. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	50.000.000	
	Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Daerah	35.990.000	APBD Kab
	1. Penyusunan rencana strategis	5.000.000	
	2. Penyusunan rencana kerja SKPD	10.000.000	
	3. Penyusunan laporan capaian kinerja	10.000.000	
	4. Penyusunan laporan keuangan SKPD	10.000.000	
Meningkatkan nilai tambah komoditas tanaman pangan	Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	775.000.000	
	Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi atau Setengah Jadi	150.000.000	APBD Kab

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	KET
	2 Pemeliharaan rutin/berkala/edang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya	43.000.000	
	3 Pemeliharaan rutin/berkala/edang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	48.100.000	
	4 Pemeliharaan rutin/berkala/edang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	54.923.725	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	APBD Kab
	1 Penguatan pelayanan dinas dan pelayanan khusus lainnya	50.000.000	
	Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Daerah	35.000.000	APBD Kab
	1 Penyusunan rencana strategis	5.000.000	
	2 Penyusunan rencana kerja SKPD	10.000.000	
	3 Penyusunan laporan capaian kinerja	10.000.000	
	4 Penyusunan laporan keuangan SKPD	10.000.000	
Meningkatkan nilai tambah ketidakhadiran tanaman pangan	Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	770.000.000	
	Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jati atau Setengah Jati	150.000.000	APBD Kab

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	KET
	Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian	1.194.414.000	APBD Kab
	Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian	16.288.840.000	APBD Kab
	Program Infrastruktur Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan	1.420.920.000	APBD Kab
	Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal + 55	2.648.000.000	APBD Kab
	Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air	128.000.000	APBD Kab
	Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	201.580.000	APBD Kab
	1. Penguatan kelembagaan HPPA/GHPPA	69.000.000	
	2. Peningkatan kapasitas SDM HPPA/GHPPA	132.600.000	
	2. Produk komoditas unggulan di kawasan agropolitan : - Padi - Durian		
	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kluster Tanaman Pangan	168.000.000	APBD Kab
	1. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan	300.000.000	
	2. Peningkatan kemampuan lembaga petani	60.000.000	
	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura	279.487.500	APBD Kab
	1. Pengembangan komoditas unggulan di kawasan agropolitan cluster hortikultura	150.000.000	
	2. Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura	69.487.500	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR AKHIR/TA	TARGET (Rp)	REK
	Peningkatan Produksi Pertanian	3.195.979.889	APSD Sah
	1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian	75.808.000	
	2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	188.808.000	
	3. Pemasyarakatan teknologi dan hasil produksi pertanian	185.708.000	
	4. Penyediaan Benih/Bibit hortikultura	369.919.000	
	5. Pelatihan dan sertifikasi pengembang organisasi pengorganisasi tanaman (OPT)	153.808.000	
	6. Pendampingan WISMP	95.879.000	
	7. Pengembangan sumberdaya unggul daerah	153.808.000	
	8. Penyusunan database potensi pertanian	75.808.000	
	9. Penyediaan sarana prasarana produksi pertanian	1.132.258.000	
	10. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	475.808.000	
	11. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian OPT	250.808.000	
	12. Water Irrigation System Management Project (WISMP)	49.490.000	
	13. Kegiatan penyuluhan, penanaman teknologi pertanian tepat guna	153.808.000	
	14. Pelatihan dan sertifikasi pengoperasian teknologi modern bertanam tanaman	158.477.500	
	15. Pelatihan penanganan teknologi	213.808.000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	KET
	Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian	3.194.414.600	APBD Kab
	Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian	18.288.840.000	APBD Kab
	Program Infrastruktur Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan	3.420.920.000	APBD Kab
	Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal = 55	2.540.000.000	APBD Kab
	Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air	120.000.000	APBD Kab
	Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	201.500.000	APBD Kab
	1. Penguatan kelembagaan HPPA/GHPPA	60.000.000	
	2. Peningkatan kapasitas SDM HPPA/GHPPA	132.500.000	
	2. Produk komoditas unggulan di kawasan agropolitan : - Pañi - Duriñi		
	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Tanaman Pangan	360.000.000	APBD Kab
	1. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan	300.000.000	
	2. Peningkatan kemampuan lembaga petani	60.000.000	
	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Hortikultura	279.487.500	APBD Kab
	1. Pengembangan komoditas unggulan di kawasan agropolitan cluster hortikultura	150.000.000	
	2. Peningkatan kemampuan lembaga petani di kawasan agropolitan cluster hortikultura	89.487.500	



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

SURAT IZIN

Nomor : 072/151.35/2017

TENTANG

IZIN PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
 - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.415/31/415.10.3.4/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
 - Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tertanggal 19 Desember 2017 nomor : 18927/JUN10.F03.11.11/PN/2017 perihal permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama	: RIZKI NURIN NAZILAH
NIM	: 145030101111133
Program Studi	: Fakultas Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya
Kegiatan	: Penelitian
Waktu	: 8 Januari s/d 7 Februari 2018
Judul Penelitian	: Strategi Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Program Pertanian Terpadu (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)
Lokasi	: Dinas Pertanian Kab. Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mem bawa manfaat bagi semua pihak;
- Meleaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
- Meritaa tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey yang dimaksud;
- Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey dimaksud.

Demikian untuk dapat di perguruan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 29 DEC 2017

a.n. **BUPATI JOMBANG**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ABDUL QUDUS, SH.
Pambina Utama Muda
NIP. 19610305 198907 1 002

Tembusan, Yth Saudara :

- Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
- Kepala Dinas Pertanian Kab. Jombang;
- Yang Bersangkutan



171722222222